

Rencana Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Kelurahan Bandengan (Participatory Land Use Planning)

**Program Peningkatan Kapasitas Sosial Ekonomi Masyarakat
Dalam Beradaptasi Perubahan Iklim
Di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan**

November 2021

Kerja Sama:

EF Indonesia-Mercy Corps Indonesia
Pemerintah Kelurahan Bandengan, Pemerintah Kota Pekalongan



Earthworm
Mercy Corps Indonesia



KATA PENGANTAR

Wilayah pesisir Pekalongan telah lama terdampak banjir limpasan dan rob, pada kurun waktu 2002-2020 tercatat 66 kejadian banjir di wilayah ini (BNPB 2020). Kejadian banjir yang berulang ini telah menimbulkan kerugian tidak hanya berupa kerusakan fisik infrastruktur dan hilangnya lahan akibat tergenang permanen, tetapi juga menurunnya pendapatan masyarakat serta meningkatnya pengeluaran masyarakat untuk menghadapi banjir. Kondisi ini tentunya memberikan beban baik bagi masyarakat yang terdampak secara langsung, maupun terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah.

Tingginya dinamika perubahan fisik di wilayah pesisir serta perkembangan pembangunan kawasan telah berimplikasi terhadap peningkatan kompleksitas kejadian banjir dan dampak perubahan iklim akan semakin meningkatkan kompleksitas ini.

Berdasarkan hasil penilaian secara cepat (RRA) Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim telah meningkatkan kerentanan masyarakat. Kerentanan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kesadaran dan kapasitas masyarakat, kelembagaan hingga kebijakan (implementasi) pembangunan daerah yang dinilai masyarakat belum maksimal.

Untuk membangun kapasitas resiliensi masyarakat terdampak perubahan iklim, dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan partisipatif, komprehensif, yang terintegrasi dengan memperhatikan keserasian fungsi lindung dan budidaya. Perencanaan pengelolaan tata guna lahan secara partisipatif (PLUP), merupakan sebuah upaya masyarakat dan stakeholder lokal dalam merumuskan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan kelurahan/wilayahnya.

PLUP ini adalah pendekatan sekaligus metode yang dapat membantu masyarakat dalam menyajikan gagasan perencanaan, memetakan kapasitas wilayahnya, menganalisis situasi wilayahnya, hingga merumuskan strategi dan program meningkatkan kapasitas resiliensi dan livelihoodnya secara sistematis, terukur dan berkesinambungan. PLUP ini menjadi inisiatif bersama antara Mercy Corp Indonesia bersama Earthworm Foundation Indonesia, dan Pemerintah Kab/Kota Pekalongan, dan Kelurahan Bandengan.

Penyusun sangat terbuka pada semua pihak atas masukan dari laporan ini, semoga dokumen ini menjadi pertimbangan para pihak dalam mendukung percepatan pemulihan masyarakat di Kelurahan Bandengan dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Pekalongan, Januari 2021

Tim Penyusun

SAMBUTAN LURAH BANDENGAN



Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, pada malam ini masih diberikan kesehatan, waktu dan kesempatan untuk bisa bertemu dan berkumpul di rumah Bapak Casono RW 6.

Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim EFI-MCI yang berkenan memikirkan wilayah di Kelurahan Bandengan. Walaupun tim bukan asli warga Bandengan namun mau peduli dan kober untuk melakukan kegiatan dan membantu warga masyarakat Bandengan saat ini masih membutuhkan arahan

dan pendampingan dari pihak luar. Semoga amal baik dari tim mendapat ridho dan pahala dari Allah SWT. Dalam Tim FF EFI-MCI juga ada yang berasal dari warga Bandengan sendiri yaitu Mas Kuwadi dan Bu Nur Risqiyati. Semangat teman-teman tim dalam memfasilitasi kegiatan semoga menular kepada masyarakat Bandengan.

Saya selaku Lurah Bandengan akan mendukung penuh kegiatan EFI-MCI baik tempat, tenaga dan pikiran. Dalam kegiatan ini saya sampaikan permohonan maaf tidak bisa membantu dalam hal konsumsi, karena anggaran kelurahan menggunakan APBD Kota merupakan anggaran yang sudah diketok tahun kemarin dan tidak bisa diotak atik, kami harus mematuhi aturan yang ada.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada EFI MCI yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga pikiran serta menyediakan konsumsi kegiatan FGD ini. Kalau teman-teman memerlukan tempat kegiatan bisa menggunakan gedung aula Kelurahan Bandengan sewaktu-waktu.

Kami juga perlu menyampaikan bahwa saya berharap dukungan seluruh warga, tanpa adanya dukungan dan kontrol warga apakah gunanya program-program yang dititipkan melalui kelurahan, baik program dari pusat, provinsi dan lainnya. Apabila ada permasalahan warga bisa diusulkan ke Lurah setempat dulu, tak perlu melapor langsung ke atas dinas/pemerintah kota.

Hal lain yang perlu saya sampaikan tentang Perpres no.14 tahun 2021 pasal 13 a "Bagi semua warga penduduk Indonesia yang menerima bantuan pemerintah tidak mau melaksanakan vaksinasi, bantuan akan dicoret atau dihentikan" walaupun warga tersebut masuk warga miskin. Harapan saya semua warga bisa bekerja sama menyelesaikan kegiatan vaksinasi. Yang berkaitan dengan pengurusan dokumen-dokumen, harus mencantumkan kartu vaksinasi.

Juga tentang INWAL (Instruksi Walikota) tahun 2021 "Seluruh bentuk pelayanan di kelurahan, kecamatan dan dinas-dinas terkait harus menunjukkan bukti/kartu vaksinasi". Ada pengecualian yang tidak bisa divaksin yaitu warga yang mempunyai penyakit bawaan seperti diabetes, darah tinggi, asma yang ditunjukkan dengan surat keterangan dokter.

Terakhir saya berpesan pada bapak ibu semua bahwa yang akan memajukan Kelurahan Bandengan bukan dari Lurahnya atau pihak luar lainnya, melainkan seluruh warga Kelurahan itu sendiri secara bergotong-royong yang mau berubah dan maju, sedangkan kami pihak kelurahan bisa memfasilitasinya.

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf saya sampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandengan, November 2021

Muhammad Abidin

(Lurah Bandengan)

SAMBUTAN PROSES PLUP TIM EFI-MCI

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadiran Allah S.W.T atas nikmat kesehatan, limpahan rejeki juga waktu dan semangat dari kita semua untuk meluangkan waktu pada acara hari ini, hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi syukur buat kita semua.

Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, tiada yang kita harapkan dikemudian hari kecuali Syafaat dari Beliau, Amin Amin Amin Ya Robbal Alamin.

Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Lurah Muhammad Abidin atas izin yang diberikan untuk mengadakan kegiatan PLUP di Kelurahan Bandengan ini.

Tidak lupa juga saya mewakili dari Earthworm Foundation dan MCI mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu yang rumahnya dijadikan tempat pertemuan pada malam hari ini, juga kami sampaikan terima kasih kepada bapak RT RW dan tokoh masyarakat serta bapak-bapak ibu semua yang hadir dalam PLUP Bandengan dan bersedia untuk mengikuti acara pada hari ini.

Saya datang kesini Bersama tim dan teman-teman FF termasuk FF dari Bandengan yaitu Mas Kuwadi dan Bu Nur Risqiyati untuk meneruskan kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan yaitu RRA. RRA itu sendiri merupakan suatu kajian cepat di wilayah Bandengan yang dilaksanakan 2 bulan yang lalu.

Tujuan kegiatan PLUP yaitu untuk mengetahui potensi lima Sumber Daya yang terdiri dari Sumber Daya Alam, kemudian Sumber Daya Buatan, Sumber Daya Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Sosial. Selain itu juga untuk melihat permasalahan yang terjadi kondisi yang terjadi 10 tahun atau 20 tahun yang lalu yaitu berubahnya kondisi sumberdaya alam seperti hilangnya sawah sekarang menjadi rawa dan banjir rob yang terjadi setiap tahun di Bandengan bahkan 80% di seluruh Kota Pekalongan.

Dari permasalahan itu kita berkumpul disini untuk mengeksplor dan mencoba mengurai apa yang harus dan diperbaiki di Kelurahan Bandengan ini agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Dan yang paling penting lagi kegiatan yang kita diskusikan dan bahas malam ini, tidak hanya berhenti sampai pertemuan PLUP ini saja tetapi bisa sampai nanti masyarakat bisa menjadi lebih baik dan mandiri. Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain pendataan *tracoon*, Demplot dan membentuk Perusahaan Petani. Semoga bapak ibu semua bias ikut berproses sampai akhir dan bisa mendapat manfaat baik secara pribadi dan bersama juga masyarakat nantinya bisa membangun ekonomi secara berkelompok.

Mungkin itu sambutan dari saya mewakili dari Earthworm dan MCI. Apabila dalam sambutan yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan terimakasih atas partisipasi bapak/ibu Kelurahan Bandengan.

Billahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, November, 2021

Imam Nur Huda
(Area Koordinator Kota
Pekalongan)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Wilayah pesisir Pekalongan telah lama terdampak banjir limpasan dan rob, berdasarkan catatan BNPB tahun 2020, menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2002-2020 tercatat 66 kejadian banjir di wilayah ini.

Berbagai dampak ditimbulkan akibat bencana ini, bukan hanya kerusakan sarana dan prasarana wilayah serta jaringan, namun juga berdampak serius terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar tak terkecuali Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Berbagai inisiatif dilakukan oleh para pihak, tak terkecuali dari pemerintahan kelurahan dan masyarakat sendiri. Situasi ini tidak bisa dipungkiri salah satunya karena akibat perubahan iklim.

Guna meningkatkan kapasitas resiliensi dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim, berbagai upaya dilakukan. Dan Mercy Corp Indonesia (MCI) bersama Earthworm Foundation Indonesia (EFI) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Kelurahan berinisiatif mengembangkan program “Penguatan Kapasitas Sosial-Ekonomi Masyarakat dalam Beradaptasi Terhadap Perubahan Iklim di Pekalongan”.

Dalam mengawali program ini, telah dilakukan serangkaian kegiatan penilaian (studi) awal, pada beberapa kelurahan/kelurahan sasaran baik di hulu maupun di hilir, dimana salah satu lokasi sasaran di hilir adalah Kelurahan Bandengan, yang selanjutnya dilakukan fasilitasi workshop perencanaan tata guna lahan secara partisipatif (*Participatory Landuse Planning/PLUP*). PLUP ini menjadi ruang perencanaan masyarakat dan stakeholder lokal dalam merumuskan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan kelurahan/wilayahnya.

Kegiatan FGD PLUP di Kelurahan Bandengan diselenggarakan FGD 1 di Rumah Bapak Casono, *pada tanggal 6 November 2021, yang dihadiri 34 orang* (25 orang dari unsur masyarakat dan 9 orang dari unsur Field Facilitator), FGD 2 di RT 01 RW 06 *pada tanggal 10 November 2021 dihadiri* (10 orang masyarakat dan 6 orang Field Facilitator) FGD ke 3 di RT 03 RW 06 *pada tanggal 19 November 2021 dihadiri* (20 orang masyarakat dan 6 orang Field Facilitator) di Kelurahan Bandengan, yang mewakili unsur pemerintahan kelurahan, lembaga kelurahan, dan kelompok masyarakat mata pencahariannya sensitif terhadap perubahan iklim.

Rangkaian kegiatan PLUP ini mencakup: (i) Kajian wilayah secara cepat (*Rapid Rural Appraisal/RRA*); (ii) Pelatihan dan Pembekalan Calon Fasilitator Kelurahan, yang diselenggarakan pada 19 September 2021; (iii) Rapat koordinasi dengan Pemerintahan Kelurahan terkait penyelenggaraan PLUP; (iv) Pelaksanaan workshop PLUP Kelurahan Bandengan.

Tujuan workshop perencanaan tata guna lahan partisipatif (PLUP) ini adalah: (i) Memetakan kapasitas sumberdaya wilayah kelurahan/kelurahan; (ii) Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan tata guna lahan wilayah melalui zonasi pengelolaan dan program strategis berbasis potensi kelurahan/kelurahan; (iii) Mendapatkan rumusan program prioritas penguatan kapasitas resiliensi dan livelihood masyarakat.

Dari penyelenggaraan workshop PLUP ini diperoleh hasil berikut:

- Rumusan visi PLUP, yakni **“Kelurahan Bandengan tidak banjir rob, bisa mengolah tambak, masyarakatnya makmur, sejahtera, maju dan mandiri”**

- Jenis SDA yang sensitif (terdampak rob dan banjir) namun mempunyai nilai sangat strategis terhadap livelihood masyarakat adalah tambak, sungai, rawa-rawa, mangrove dan pantai/pesisir.
- Ditentukannya zonasi fungsi lindung, berupa hutan mangrove; sementara zonasi fungsi budidaya berupa: sawah, tambak, rawa-rawa

9 (sembilan) isu strategis Kelurahan Bandengan yang dinilai dapat meningkatkan kapasitas sosial ekonomi masyarakat terhadap perubahan iklim, yakni:

1. Membangun sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial.
2. Mendorong Kebijakan penanggulangan rob/banjir
3. Meningkatkan kapasitas budidaya pertanian, perikanan dan pariwisata
4. Revitalisasi kelembagaan masyarakat dan kelurahan.
5. Memperkuat kelembagaan bisnis dan permodalan kelompok masyarakat.
6. Meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim.
7. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan air bersih
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan
9. Mendorong kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penguatan petani dan sektor pertanian.

Peluang usaha Masyarakat Kelurahan Bandengan untuk jangka waktu satu tahun kedepan adalah: (i) Pengolahan berbagai produk perikanan; (ii) Pengolahan berbagai produk perikanan; (iii) Perlakuan pengemasan (packing) yang sesuai dengan standar kemasan produk nasional; (iv) Pengadaan pakan murah; (v) Kerjasama dengan berbagai pihak; (vi) “Memutus” jaringan rantai pasok pakan ikan; (vii) Rehabilitasi pesisir dan rawa menjadi tempat yang lebih produktif.

Dalam PLUP dihasilkan pula Tim Penggerak yang bertanggung jawab mengoordinir atas arahan program strategis, yang menjadi mitra pemerintahan kelurahan dan masyarakat dalam mempercepat pelaksanaan program strategis guna mewujudkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di Kelurahan Bandengan.

KREDIT

Narasumber/Partisipan	:	M. Abidin (Lurah Bandengan), Sarono, Casono, Rasjan, Duki, Tarjuki, Khambali, Wowok, Salatun, Idris, Jafar S, Waluyo, Damiri, Daryanto, Darsono, Trisno, Dharwanto, Slamet Waeri, Djanu Prayoga, Yahya, Damiri, Daryani, Rasulin, Hermanto, Andi Imawan, Rohadi, Waluyo, Armanto, Rasmadi
Kontributor & Pendukung Proses	:	Nofri Iswandi, M. Aminuddin, Sigit Wijanarko, Arif Anshori, Emy Setya D., Okta Dwi F, Maun Kusnandar, Arif, Raggi. Notulen: Achmad Sachawi Dokumentasi: Syarif (kepala produksi), Hadian dan Yusron (kameramen), Arif (editor)
Fasilitator	:	Imam Nur Huda (Fasilitator Utama); Sigit Wijanarko, M. Khulwani, Arif Ansori, Abdush Shomad, Ahmad Sachawi, Catur Wijayanto, Giono, Kuwadi, Nur Risqiyati, Hermanto, Minarsih (Co Fasilitator)
Sumber Peta	:	Peta Penutup Lahan LHK 2020, BIG dan Hasil olahan survei lapangan.
Program dan Kerja sama	:	Program Penguatan Kapasitas Sosial-Ekonomi Masyarakat dalam Beradaptasi Terhadap Perubahan Iklim di Pekalongan; Kerja sama EFI-MCI Indonesia dan Pemerintah Kota Pekalongan, November 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

SAMBUTAN LURAH BANDENGAN ii

SAMBUTAN Proses PLUP Tim EFI-MCIiii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

KREDIT..... vi

Daftar Isi.....vii

DAFTAR TABELviii

DAFTAR GAMBAR.....viii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1

2. Kerangka Konseptual..... 2

3. Tujuan dan Keluaran..... 6

4. Metode..... 6

5. Alur Proses PLUP 7

BAB II. GAMBARAN UMUM BANDENGAN 10

1. Selayang Pandang Kelurahan Bandengan 10

2. Gambaran Perubahan Wilayah Bandengan 10

3. Geografi, Demografi & Letak Administrasi 10

4. Penggunaan Lahan wilayah..... 11

5. Aksesibilitas Wilayah..... 12

6. Struktur Pemerintah Kelurahan Bandengan 13

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN PLUP 14

1. Visi PLUP Bandengan..... 14

2. Aset Wilayah Bandengan..... 15

3. Perubahan dan Kecenderungan Tata Guna Lahan 21

4. Permasalahan Kelurahan Bandengan..... 23

BAB IV. ZONASI & ARAHAN PENGELOLAAN..... 30

1. Zonasi Wilayah Bandengan 30

2. Arahana Strategis Pengembangan Wilayah kelurahan Bandengan..... 32

BAB V. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH 33

1. Proram Pengembangan Wilayah..... 33

2. Program Prioritas 37

3. Tim Penggerak Hasil PLUP 39

LAMPIRAN 40

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Penggunaan Lahan Kelurahan Bandengan berdasarkan hasil PLUP 2021 11

Tabel 2: Keterangan Visi Kelurahan Bandengan..... 15

Tabel 3: Jenis Aset SDA Sensitif Perubahan Iklim Kelurahan Bandengan 16

Tabel 4: Jenis pekerjaan masyarakat Bandengan yang sensitive terhadap perubahan iklim..... 16

Tabel 5: Kelompok rentan terhadap perubahan iklim (ancaman rob dan banjir) Kelurahan Bandengan 17

Tabel 6: Sumberdaya Buatan Yang Terpapar Akibat Banjir dan Rob di Kelurahan Bandengan 18

Tabel 7: Modal sosial (SDS) Masyarakat yang Mendukung resilensi masyarakat Bandengan. 18

Tabel 8: Jenis Komoditas (SDE) yang dihasilkan Masyarakat Bandengan 19

Tabel 9: Jenis Barang/Komoditas Yang Dibeli (dikonsumsi setiap hari) oleh Masyarakat Bandengan..... 20

Tabel 10: Perubahan Tutupan Lahan Jenis SDA Kelurahan Bandengan (1990, 2000, 2021) 22

Tabel 11: Pengelompokan isu strategis Kelurahan Bandengan 25

Tabel 12: Hasil Penilaian (Skoring) Prioritas Akar Masalah Kelurahan Bandengan..... 28

Tabel 14: Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kesejahteraan Sosial..... 33

Tabel 15: Program Penanggulangan Rob/Banjir 33

Tabel 16: Program Peningkatan Kapasitas Budidaya Perikanan 34

Tabel 17: Program Revitalisasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan..... 34

Tabel 18: Program Peningkatan Kapasitas Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim..... 35

Tabel 19: Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pemenuhan Air Bersih..... 35

Tabel 20: Peningkatan Kebijakan Pemerintah terhadap Penguatan Petani dan Sektor Perikanan..... 36

Tabel 21: Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Lingkungan..... 36

Tabel 22: Program prioritas (peluang) usaha Masyarakat Kelurahan Bandengan 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Diagram bagan alir tahapan proses fasilitasi workshop PLUP 7

Gambar 2: Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Bandengan 12

Gambar 3: Struktur Pemerintah Kelurahan Bandengan 13

Gambar 4: Peta Visi Masyarakat Kelurahan Bandengan 14

Gambar 5: Peta Perubahan Penutupan Lahan 1990, 2000, 2010, 2021 Kelurahan Bandengan 21

Gambar 6: Diagram Isu strategis dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Bandengan..... 29

Gambar 6: Peta Zonasi Arahan Pengelolaan Tata Guna Lahan Kelurahan Bandengan..... 31

Gambar 7: Diagram Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Bandengan 32

Gambar 8: Struktur Tim Penggerak Kelurahan Bandengan 39

BAB I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pesisir Kota Pekalongan telah lama terdampak banjir limpasan dan rob. Pada kurun waktu 2002-2020, sebanyak 66 kejadian banjir tercatat terjadi di wilayah ini (BNPB 2020). Kejadian banjir ini merupakan kombinasi dari curah hujan yang tinggi, perubahan tata guna lahan dan penampang sungai, serta pasang-surut air laut (Pasaribu et al. 2013). Secara historis, kawasan pesisir Pekalongan memiliki laju kenaikan muka air laut sebesar 5 mm/tahun (COREM-UNDIP 2020); lebih tinggi dari laju di Laut Jawa secara umum yang sebesar 3,9 mm/tahun (Kismawardhani et al. 2018). Kawasan ini juga menghadapi isu penurunan muka tanah yang diketahui berada pada kisaran 10-17 cm pada periode 2012-2018 (Tempo, 2019).

Kejadian banjir yang berulang ini telah menimbulkan kerugian tidak hanya berupa kerusakan fisik infrastruktur dan hilangnya lahan akibat tergenang permanen, tetapi juga menurunnya pendapatan masyarakat serta meningkatnya pengeluaran masyarakat untuk menghadapi banjir. Kondisi ini tentunya memberikan beban baik bagi masyarakat yang terdampak secara langsung, maupun terhadap kondisi fiskal pemerintah daerah.

Tingginya dinamika perubahan fisik di wilayah pesisir serta perkembangan pembangunan kawasan telah berimplikasi terhadap peningkatan kompleksitas kejadian banjir dan rob, demikian halnya dampak perubahan iklim akan yang semakin meningkatkan kompleksitas masalah wilayah. Untuk merumuskan langkah pengendalian yang tepat, perlu adanya pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab banjir, interaksi antar faktor tersebut serta kemampuan wilayah dalam merespon.¹

Berdasarkan hasil penilaian wilayah secara cepat (RRA)² di Kelurahan Bandengan³ hasilnya memperkuat pada kajian-kajian sebelumnya, bahwa dampak perubahan iklim telah meningkatkan kerentanan masyarakat. Pun demikian, bahwa kerentanan yang terjadi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti faktor kesadaran dan kapasitas masyarakat, kelembagaan lokal hingga faktor implementasi kebijakan pembangunan daerah yang dinilai masyarakat belum maksimal.

Sementara hasil penilaian secara cepat (RRA)⁴ di 4 (empat) desa wilayah hulu yang mencakup Desa Yosorejo, Simego, Tologohendro, dan Desa Kayupuring Kecamatan Petungkriyono, dan 2 (dua) desa di wilayah tengah yaitu Desa Batursari dan Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan pun memperkuat hubungan kasus antara hulu dan hilir dalam konteks dampak perubahan iklim.

Ditemukan data bahwa isu kerentanan masyarakat di hulu dan tengah, disamping karena faktor dampak perubahan iklim, juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam/lahannya. Masalah meningkatnya kebutuhan lahan pertanian, kesadaran budidaya pertanian yang ramah lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan akses kesehatan, aksesibilitas dan jaringan jalan, lemahnya

¹ Brief Report - Hazard, Vulnerability and Risk Assessment of Kupang Watershed; Zurich Flood Resilience Alliance; Mercy Corp Indonesia

² Earthworm Foundation Indonesia, September 2021

³ Kegiatan RRA pesisir mencakup Kelurahan Bandengan, Krapyak dan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan Desa Jeruksari Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

⁴ Earthworm Foundation Indonesia, September 2021

kelembagaan tani serta soal kebijakan pemerintah daerah yang (dinilai) belum optimal, adalah isu-isu yang cukup banyak ditemukan.

Situasi ini menunjukkan bahwa untuk membangun kapasitas adaptasi masyarakat (hulu-hilir) dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan partisipatif, komprehensif, yang terintegrasi (isu) hulu-hilir, memperhatikan keserasian fungsi lindung dan budidaya dalam satuan system lanskap.

Proses penyusunan perencanaan pengelolaan tata guna lahan secara partisipatif (PLUP) ini adalah upaya dari masyarakat dalam membuat kebijakan perencanaan pengelolaan tata guna lahan desa/kelurahan guna memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi disekitarnya.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

1. PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAPASITAS RESILIENSI

Istilah pengembangan masyarakat di Indonesia sudah cukup populer sejak tahun 70-an, dengan berbagai ragam penyebutan istilah dan terminologinya.

PBB mengartikan pembangunan masyarakat, sebagai proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya. Suharyanto dalam teori pembangunan masyarakat kelurahan (*Rural Community Development*) merujuk pada upaya perbaikan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang secara umum menggantungkan hidupnya dari pengelolaan sumberdaya alam. Sementara Arif Budiman, menilai bahwa keberhasilan pembangunan disamping memperhatikan pada pertumbuhan ekonomi (yang tinggi) juga memperhatikan pada keberlanjutan yang didalamnya menyaratkan pada tidak terjadinya dan/bertambahnya kesenjangan sosial (alienasi dan dehumanisasi) serta tidak dilakukannya perusakan terhadap sumberdaya alam (eksploitasi).

Resiliensi sebagai konsep pengembangan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok atau masyarakat yang memungkinkan untuk menghadapi, meminimalkan, menghilangkan, bahkan mencegah (potensi) dampak dan risiko yang (berpotensi) merugikan keberlanjutan hidupnya, sehingga sehingga apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat dapat terwujud.

Dalam konteks program adaptasi perubahan iklim, resiliensi dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan kelompok petani/masyarakat yang rentan (potensi) terpapar terhadap perubahan iklim yang terjadi, sehingga mampu menganggulangi permasalahan yang terjadi dan dapat beradaptasi atas situasi perubahan-perubahan (lingkungan), dan masyarakat tetap dapat memenuhi livelihoodnya secara berkelanjutan.

Dalam membangun resiliensi komunitas tidak dapat dilepaskan dengan konsep pengembangan masyarakat. Indikator komunitas resilien, seperti (i) mempunyai kepercayaan diri dan motivasi yang kuat; (ii) Memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis mendayagunakan SDA/lahannya dengan baik; (iii) Mempunyai aset lahan yang produktif dengan kepastian legalitas penguasaan; (iv) Pendapatan yang cukup; (v) Dukungan kelembagaan sosial yang memadai; (vi) Mempunyai akses informasi yang mudah, jaringan pasar serta akses permodalan serta dukungan kemitraan; dan (vii) adanya dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak; adalah indikator-indikator yang penanda

bahwa komunitas tersebut resilien. Dalam konsep resiliensi, EF Indonesia menggunakan 3 (tiga) jenjang sasaran, yakni, sasaran primer, sekunder dan sasaran tersier.

Sasaran primer, fokus pada upaya memperkuat kapasitas individu yang mencakup kepercayaan diri⁵, motivasi⁶ dan kapasitas individu⁷. Sasaran sekunder fokus pada penguatan Kelompok dan Kelembagaan yang mengurus kelompok masyarakat, dalam hal ini yang mata pencahariannya sensitive terhadap dampak perubahan iklim; misalnya kelompok petani secara umum⁸, sementara sasaran tersier fokus pada kemampuan kelompok masyarakat dalam mendorong kebijakan pemerintah agar mendukung (pemecahan masalah dan pencapaian tujuan) kelompok masyarakat⁹.

Ketiga sasaran ini mesti dipenuhi untuk mewujudkan keberdayaan dan kapasitas resiliensi sehingga terwujud masyarakat yang berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. PENDEKATAN DAN PRINSIP MATA PENCAHARIAN BERKELANJUTAN

Gagasan dan konsep penghidupan yang layak (sustainable livelihood - SL) tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Robert Chambers di pertengahan 1980-an, yang kemudian dikembangkan oleh Chambers, Conway, dan para ahli yang lain di awal tahun 1990-an. Konsep tersebut kemudian diadopsi oleh banyak lembaga internasional sebagai alternatif pendekatan pembangunan pada awal 1990an yang dipicu dari maraknya kasus kelaparan dan kerawanan pangan di sejumlah negara pada tahun 1980-an¹⁰

Chambers dan Conway dalam "Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st Century" (1991:i) memaknai livelihood sebagai orang-orang dengan kemampuan dan cara hidup mereka yang didalamnya termasuk juga makanan, pendapatan dan aset (baik tangible assets berupa sumberdaya dan perbekalan, dan intangible assets berupa klaim dan akses).

Ashley dan Carney, dalam Sustainable Livelihoods: Lessons from Early Experience (1999) mengemukakan prinsip-prinsip sustainable livelihood sebagai berikut: Bahwa dalam kegiatan pembangunan yang fokus pada kemiskinan harus:

- Berpusat pada Manusia/Masyarakat (*people-centered*). Bahwa upaya mengurangi kemiskinan yang berkelanjutan akan tercapai hanya jika ada dukungan eksternal yang fokus pada apa yang penting bagi orang-orang, memahami perbedaan antara

5 Ego merupakan identitas dan karakter pribadi sebagai petani, sehingga mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap sesuatu baik potensi atau yang manifest yang melekat pada individu petani.

6 "Mengungkit" dorongan berubah dari diri petani untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini membangkitkan rasa kepercayaan diri untuk berubah guna mencapai suatu tujuan hidup petani baik sebagai individu atau sebagai anggota rumah tangga petani (intrinsik dan ekstrinsik).

7 Pengetahuan dan ketrampilan serta sikap petani, dengan mendorong peningkatan kapasitas berupa pengetahuan dan ketrampilan produksi agar mampu mendayagunakan sumberdaya alam dan lahan yang dimiliki dan/atau dikuasainya agar menjadi produktif, optimal, berdaya guna dan multi guna sehingga mendukung livelihood diri dan keluarganya

8 Termasuk kapasitas organisasi dalam berjejaring dan bermitra baik ditingkat komunitas sendiri maupun dengan jaringan pasar yang lebih luas

9 Kapasitas dalam mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung petani dan sector pertanian, seperti kebijakan pengolahan, agroindustri, kebijakan perdagangan (trade policy), seperti perlindungan produk petani, perlindungan harga jual, akses permodalan dan pemasaran dan lain-lain.

¹⁰ Haidar, "Sustainable Livelihood Approach: The Framework, Lessons Learnt from Practice and Policy Recommendations," 2009)

kelompok orang dan bekerja dengan mereka dengan cara yang sama dan sebangun dengan strategi penghidupan mereka saat ini, lingkungan sosial dan kemampuan untuk menyesuaikan.

- Responsif dan Partisipatif. Bahwa dalam pendekatan sustainable livelihood, suatu intervensi yang dilakukan adalah respon atas situasi/problem yang terjadi dimasyarakat dan lingkungan sekitarnya. Partisipatif merujuk pada menempatkan orang miskin itu sendiri-lah yang harus menjadi aktor kunci dalam mengidentifikasi dan mengatasi prioritas penghidupan. Orang luar harus terlibat dalam proses yang memungkinkan mereka untuk mendengarkan dan menanggapi orang miskin.
- *Multilevel*. Bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang saling terkait dan bertingkat, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berjenjang dan bertingkat. Memastikan bahwa kegiatan di tingkat mikro dapat memberikan informasi pada penyusun kebijakan yang lebih tinggi, menciptakan lingkungan yang efektif; dan bahwa struktur dan proses di tingkat makro juga mendukung masyarakat untuk membangun kekuatan mereka sendiri.
- Kemitraan. Bahwa mengingat isu kemiskinan banyak factor yang mempengaruhi, maka diperlukan kemitraan dan pelibatsertaan para pihak, baik dari sector public (pemerintah), private (Perusahaan) hingga civil society (akademisi, LSM)
- Berkelanjutan. Bahwa upaya mewujudkan keberlanjutan livelihood masyarakat, perlu menyelaraskan antara aspek ekonomi, sosial (termasuk kelembagaan komunitas) dan ketersediaan sumberdaya alam secara lintas generasi.

3. ASET PENTAGONAL: KOMPONEN MATA PENCAHARIAN BERKELANJUTAN

Merujuk pada konsep dan definisi tentang *sustainable livelihood* yang dikemukakan oleh Chambers dan Conway, yang antara lain menitikberatkan pada aspek kemampuan, aset (tangible dan intangible), akses, dan pendapatan, yang oleh DFID dikembangkan menjadi kerangka kerja livelihood. Kerangka kerja livelihood ini mengidentifikasi 5 (lima) kategori aset utama yang selanjutnya disebut juga sebagai 5 (lima) modal sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Kelima modal tersebut adalah: (i) Modal Sumberdaya Alam; (ii) Modal Pengetahuan dan Kapasitas Masyarakat (*Human Capital*); (iii) Sumberdaya Kelembagaan Komunitas/Masyarakat (*Social Capitals*); (iv) Modal Fisik (Buatan) (Sarana dan Prasarana serta Jaringan) (*Infrastructures and Utilities*); dan (v) Sumberdaya Ekonomi dan Keuangan Masyarakat (*Economic and Financial Capitals*)¹¹. Kelima aset tersebut, satu dengan lainnya saling terkait, dan menjadi factor pengaruh kualitas *livelihood* suatu masyarakat.

4. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PLUP.

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan wilayah harus memperhatikan pola ruang, yakni kebijakan pembangunan yang menjaga keseimbangan antara fungsi budidaya dan lindung. Lebih lanjut dalam UU ini disebutkan bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, maka diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan,

11 DFID, 1999

efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam peraturan ini merentang dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang.

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang ini diatur sedemikian rupa dalam pasal 65, bahwa: (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat; (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: (a) Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; (b) Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan (c) Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Partisipasi masyarakat ini selaras dengan semangat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan, dimana kelurahan saat ini perlu menjadi garda depan dalam proses pembangunan wilayah kelurahan). Paradigma dari “membangun kelurahan” menjadi “kelurahan membangun” menyaratkan kesiapan aparatur pemerintahan kelurahan berserta kelembagaannya dan partisipasi aktif masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijak dan arif, dari pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, modal social hingga sumberdaya ekonominya, sebagai modal masyarakat/pemerintahan kelurahan untuk memajukan daerahnya dan memakmurkan masyarakat disekitarnya.

Untuk menjaga keseimbangan dalam proses pembangunan kawasan perkelurahan, maka diperlukan kebijakan yang mendukung keserasian dan keseimbangan fungsi ruang (budidaya dan lindung). Dan untuk mewujudkan agenda tersebut, dibutuhkan inisiasi perencanaan pengelolaan sumberdaya alam/kawasan hutan/pesisir yang terintegrasi, melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintahan kelurahan/desa serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya alamnya secara lintas generasi.

Participatory Land Use Planning (PLUP) atau perencanaan tata guna lahan secara partisipatif merupakan konsep perencanaan tata guna lahan pada satuan wilayah yang diselenggarakan secara partisipatif guna merumuskan arahan pengelolaan sumberdaya alam/lahan sesuai dengan peruntukannya, guna mewujudkan keserasian pengelolaan fungsi dan mendukung resiliensi dan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Kegiatan perencanaan tata guna lahan ini diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif (*participatory approach*), dengan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yakni sebuah metode pengkajian sumberdaya wilayah dengan melibatkan pemangku kepentingan atas sumberdaya yang dipetakan secara partisipatif khususnya masyarakat yang tinggal dalam wilayah yang bersangkutan.

Dalam proses penyelenggaraan workshop PLUP, peran orang luar sebagai fasilitator, yang membantu masyarakat/stakeholder mengidentifikasi, merumuskan dan menyusun langkah-langkah proses kajian, sementara masyarakat sebagai narasumbernya.

Metode Diskusi kelompok terfokus (FGD), *check* dan *recheck* hasil FGD dilakukan melalui pleno, sehingga hasil diskusi kelompok terklarifikasi (dan terkonfirmasi) oleh kelompok lain sehingga menghasilkan data yang berkeandalan.

3. TUJUAN DAN KELUARAN

Tujuan kegiatan penyelenggaraan perencanaan tata guna lahan partisipatif (PLUP) ini adalah:

1. Memetakan kapasitas sumberdaya wilayah desa/kelurahan.
2. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan tata guna lahan wilayah melalui zonasi pengelolaan dan program startegis berbasis potensi kelurahan/kelurahan.
3. Mendapatkan rumusan program prioritas penguatan kapasitas resiliensi dan *livelihood* masyarakat

Sementara keluaran dari kegiatan PLUP ini adalah:

1. Dokumen rencana pengelolaan tata guna lahan secara partisipatif pada skala kelurahan/kelurahan.
2. Arah kebijakan dan strategi pengelolaan tata guna lahan kelurahan/komunitas yang memperkuat kapasitas wilayah dalam merespon dampak perubahan iklim.
3. Program prioritas dan program alternatif pengembangan usaha komunitas yang memperkuat resiliensi dan *livelihood* masyarakat.

4. METODE

Sebelum workshop PLUP, beberapa kegiatan penilaian wilayah telah dilakukan, antara lain:

- Desktop study, dilakukan dengan melakukan kajian data pustaka dan analisis data citra satelit dari tutupan lahan (*land cover*) wilayah kelurahan dan/atau kecamatan dalam bentang alam wilayah kota.
- *Rapid Rural Appraisal (RRA)*, dilakukan wawancara, observasi wilayah, diskusi dan konsultasi hasil olahan peta (desktop study) kepada pemangku kepentingan dan narasumber relevan¹².

Sementara saat fasilitasi workshop PLUP, metode yang digunakan antara lain:

- Kontrak sosial, yakni upaya membangun kesepahaman dan kesepakatan atas perlu/tidaknya diselenggarakannya workshop, dengan tetap menggunakan persetujuan awal dari masyarakat/kelurahan (prinsip *FPIC*).
- *PRA (Participatory Rural Appraisal)*, yakni sebuah metode pengkajian sumberdaya kelurahan bersama masyarakat/kelompok masyarakat.
- Diskusi Kelompok Terfokus (FGD); dalam proses fasilitasi PLUP, fasilitator, membantu mengidentifikasi, merumuskan dan menyusun langkah-langkah proses kajian dengan masyarakat sebagai narasumber, sekaligus pelaku proses pengkajian dan pelaksana keputusan yang dihasilkan. Dalam proses FGD dilakukan pula check dan recheck hasil FGD melauai pleno kelompok dan antar kelompok diskusi, sehingga hasil diskusi kelompok terklarifikasi (dan terkonfirmasi) oleh kelompok diskusi lainnya.
- Bahan dan Peralatan (*tools*); perlengkapan yang digunakan dalam proses fasilitasi workshop PLUP ini antara lain: (i) Peta dasar land use kelurahan; (ii) ATK, berupa kertas plano, selotip kertas, spidol warna dan metacard (potongan kertas ukuran tertentu untuk mendokumentasikan gagasan masyarakat).

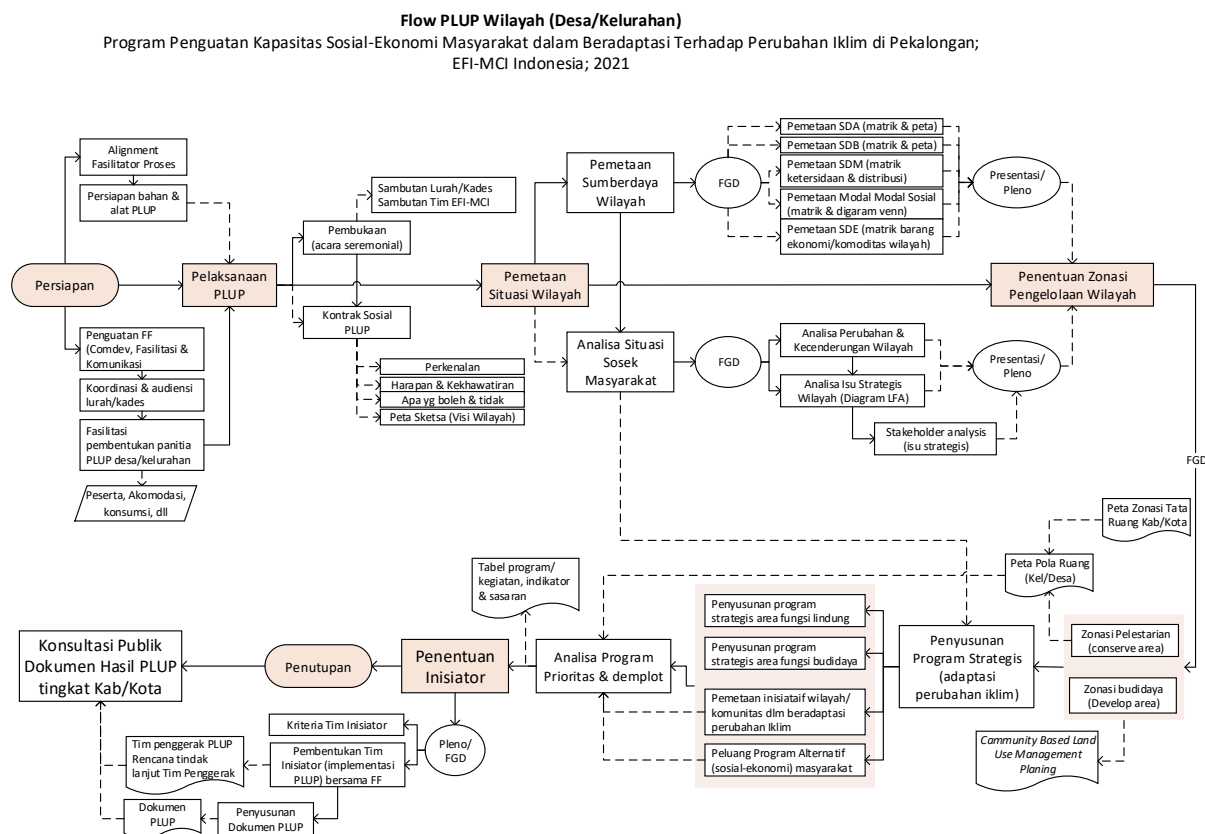
¹² Dalam kajian data primer ini, dilakukan pula Field Diagnostic, sebuah metode diagnosis untuk menilai perspesi masyarakat terkait situasi wilayahnya, terkait dengan livelihood dan resiliensi rumah tangga petani.

- Dokumentasi, hasil fasilitasi proses workshop dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan komunitas yang menjadi pegangan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang relevan.
- Konsultasi publik, yakni sebuah metode menyampaikan isi dokumen hasil dari workshop PLUP kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan *feedback*, respon dan koreksi (jika diperlukan) serta untuk mengembangkan program kemitraan/kerja sama (kolaborasi) lebih lanjut.

5. ALUR PROSES PLUP

Berikut adalah diagram proses fasilitasi workshop PLUP (*Participatory Landuse Planning*):

Gambar 1: Diagram bagan alir tahapan proses fasilitasi workshop PLUP



Berikut adalah keterangan bagan alir proses fasilitasi workshop PLUP:

1. Persiapan, mencakup:

- Penguatan kapasitas fasilitator lapangan (Field Facilitators) terkait pengembangan masyarakat, pendekatan partisipatif, teknik fasilitasi partisipatif dan komunikasi.
- Audiensi dan presentasi kepada stakeholder kunci (kelurahan/desa)
- Fasilitasi diskusi pembentukan tim pelaksana PLUP tingkat kelurahan/desa bersama pemerintah kelurahan/desa.
- Identifikasi dan penentuan calon partisipan, penentuan tempat, konsumsi, perlengkapan termasuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses workshop PLUP.

2. Pelaksanaan, rangkaian acara proses workshop PLUP meliputi:

2.1 Pembukaan

- Pembukaan, pembukaan acara workshop dilakukan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan sambutan dari kepala desa/lurah dilanjutkan dengan sambutan dari wakil Tim EFI-MCI.

2.2 Kontrak sosial, proses ini mencakup:

- Perkenalan, yakni proses membangun keakraban dan saling mengenal antar partisipan dan antar fasilitator dan partisipan.
- Diskusi kelompok terfokus, yang mencakup: (i) diskusi kelompok harapan dan kekhawatiran; (ii) diskusi kelompok aturan proses (apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses diskusi; (iii) diskusi kelompok waktu, yakni kelompok yang membahas jadwal/tata waktu selama kegiatan workshop PLUP; dan (iv) diskusi kelompok peta sketsa visi, yakni kelompok yang membahas peta sketsa visi desa/kelurahan.

2.3 Pemetaan potensi wilayah, mencakup:

- Diskusi kelompok pemetaan sumberdaya alam (SDA);
- Diskusi kelompok pemetaan sumberdaya manusia (SDM), terutama tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan masyarakat;
- Diskusi kelompok pemetaan jenis sarana dan prasarana wilayah (sumberdaya buatan/SDB);
- Diskusi kelompok jenis sumberdaya sosial/kelembagaan masyarakat (sumberdaya sosial/SDS), termasuk kelompok/lembaga masyarakat, formal atau nonformal; dan
- Diskusi kelompok jenis sumberdaya ekonomi (SDE), yang meliputi jenis komoditas yang dihasilkan (produksi) dan dijual masyarakat, termasuk lembaga keuangan yang diakses masyarakat.

Hasil diskusi kelompok kemudian diplenokan kepada seluruh peserta workshop PLUP yang dipandu oleh fasilitator.

2.4 Pemetaan dan analisis masalah wilayah, dalam proses ini, yang dilakukan adalah:

- Diskusi kelompok perubahan dan kecenderungan wilayah desa/kelurahan dengan merujuk pada jenis SDA penting dan sensitive terhadap perubahan iklim.
- Diskusi kelompok identifikasi masalah dan analisis isu strategis wilayah
- Diskusi kelompok analisa para pemangku kepentingan atas isu strategis wilayah

2.5 Penentuan/pemetaan zonasi pengelolaan wilayah (FGD), mencakup:

- Diskusi kelompok pemetaan dan penentuan zonasi wilayah untuk fungsi perlindungan
- Diskusi kelompok pemetaan dan penentuan zonasi wilayah untuk fungsi budidaya

2.6 Penyusunan program startegis wilayah, yang mencakup:

- Diskusi kelompok program startegis pada zona lindung
- Diskusi kelompok program strategis pada zona budidaya
- Diskusi kelompok program strategis terkait dengan livelihood masyarakat dan kebijakan yang mendukung adaptasi masyarakat terhadap perbahan iklim
- Diskusi kelompok analisa program prioritas demplot
- Diskusi kelompok identifikasi inisiatif masyarakat yang sudah dilakukan
- Diskusi kelompok penentuan program prioritas untuk satu tahun kedepan

Hasil diskusi kelompok kemudian diplenokan kepada seluruh peserta workshop PLUP yang dipandu oleh fasilitator

2.7 Penentuan Tim Penggerak (inisiator PLUP), tahapan yang dilakukan antara lain:

- Diskusi penentuan kriteria anggota tim penggerak;
- Diskusi pemilihan anggota tim penggerak dan penyusunan rencana tindak lanjut (termasuk penyusunan dokumen PLUP untuk pelaksanaan konsultasi publik)

2.8 Penutup (doa dan foto bersama)

BAB II. GAMBARAN UMUM BANDENGAN

1. SELAYANG PANDANG KELURAHAN BANDENGAN

Secara bahasa Bendengan bermakna Bandeng (Jawa) = ikan bandeng, *Chanos chanos*, jenis ikan air payau. Dan An (Jawa) = daerah atau tempat. Jadi secara bahasa bandengan berarti daerah penghasil ikan bandeng yang melimpah. Ini merujuk pada suatu tempat antara Kandang Panjang dan Bandengan Kabupaten Pekalongan dengan air payau dan ikan jenis Bandeng yang melimpah. Sebelum bernama Bandengan pada masa kolonial maupun awal kemerdekaan daerah ini bernama Lambang Sari, yang berarti lambang atau simbol inti, indah dan kesempurnaan.

Pada awalnya Bandengan adalah Desa yang berada di wilayah administratif Kabupaten Pekalongan. Menjadi bagian dari Kelurahan di Kota Pekalongan pada Tahun 1988 dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Daerah Tingkat II Kabupaten Pekalongan dan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang. Namun demikian Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1988 tersebut terimplementasi sepenuhnya pada tahun 1999 atau periode kepemimpinan Drs. Karibkin Syarif sebagai kepala desa.

2. GAMBARAN PERUBAHAN WILAYAH BANDENGAN

Pada tahun 1990an sebagian wilayah Kelurahan Bandengan adalah lahan pertanian, pekebunan dan perikanan tambak. Wilayah pesisir menjadikan lahan di daerah ini subur dan potensial sebagai lahan pertanian, pekebunan dan perikanan tambak. Terdapat dua sungai sebagai irigasi lahan pertanian dan perikanan di wilayah Bandengan yaitu Sungai Betingan dan Sungai Segrabyag. Kedua sungai ini memanjang melintasi wilayah Kelurahan Bandengan dari barat ke timur. Dukungan sumberdaya alam di wilayah ini menjadikan Bandengan daerah yang makmur dan menjadi daerah tujuan pemukiman penduduk.

Tahun 2005, banjir rob yang mulai terjadi di wilayah Kelurahan Bandengan dan menggenangi sawah dan tambak, kemudian mulai tahun 2008 genangan rob sudah masuk ke permukiman. Dampak rob ini mengubah struktur lahan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Bandengan.

Lahan pertanian, perikanan tambak dan pekebunan melati yang sempat mejadikan tumpuan hidup masyarakat dimasa kejayaannya (tahun 1960-1990an) berubah menjadi lahan tidak produktif karena terendam air rob dengan ketinggian antara 2-3 meter. Sementara dampak banjir rob juga menimpa pemukiman dan rumah penduduk hingga ketinggian 1-2 meter. Dan banyak masyarakat yang beralih profesi dan sebagian lagi kehilangan pekerjaan, terutama petani dan penambak.

3. GEOGRAFI, DEMOGRAFI & LETAK ADMINISTRASI

5. KONDISI GEOGRAFIS BANDENGAN

Kelurahan Bandengan merupakan wilayah pesisir yang terletak di sebelah utara Kota Pekalongan dengan ketinggian 1 Mdpl dengan koordinat $6^{\circ}52'20.9''S$ $109^{\circ}39'3''E$.

Secara geografis Kelurahan Bandengan berada di datarah rendah, dan merupakan kelurahan yang terletak paling utara di Kota Pekalongan, dengan luas wilayah sekitar 172,58 ha¹³.

6. DEMOGRAFI BANDENGAN

Kelurahan Bandengan memiliki jumlah penduduk sekitar 6.928 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.497 jiwa dan perempuan sebanyak 3.431 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sekitar 1.619 KK¹⁴.

7. LETAK ADMISITRASI BANDENGAN

Adapun batas-batas Kelurahan Bandengan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kelurahan Kandang Panjang
- Sebelah Selatan : Kelurahan Padukuhan Kraton
- Sebelah Barat : Desa Jeruksari Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan

4. PENGGUNAAN LAHAN WILAYAH

Berdasarkan data olahan peta tutupan lahan menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kelurahan Bandengan adalah permukiman dengan luas sekitar 26 ha, rawa sekitar 14 ha, sungai sekitar 1 ha dan tambak sekitar 153 ha. Berdasarkan data olahan petani ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan Bandengan didominasi oleh tambak.

Sementara berdasarkan hasil diskusi kelompok pada saat PLUP, bahwa penngunaan lahan di Bandengan secara umum meliputi tambak, rawa (eks sawah/lahan kosong), tanggul rob dan long storage, laut/pesisir dan Sungai Betingan/Segrebyak.

Tabel 1: Tabel Penggunaan Lahan Kelurahan Bandengan berdasarkan hasil PLUP 2021

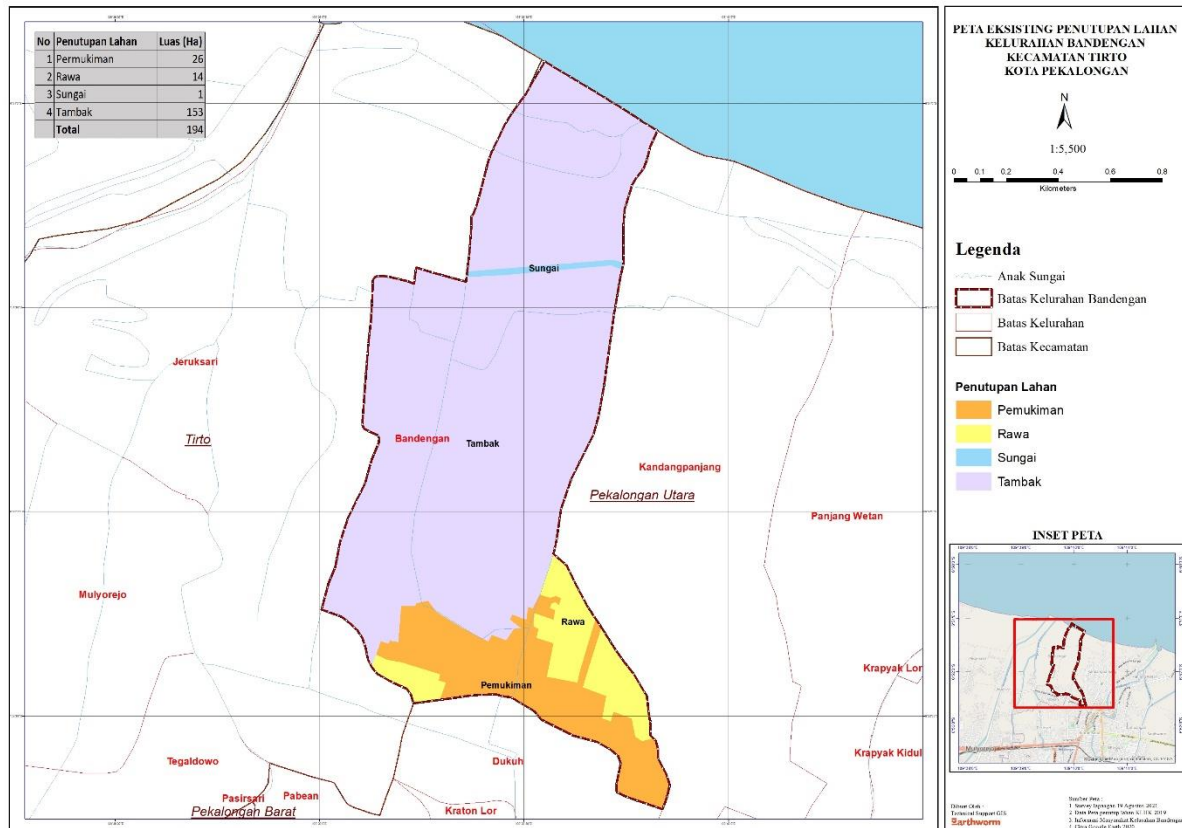
No	Jenis Tata Guna Lahan	Luas (ha)	Keterangan
1	Laut dan pesisir	1	Produktif untuk Budidaya Bandeng
2	Tambak	20	20 ha Masih produktif (terancam rob) dan 30 ha tidak produktif (terkena rob)
3	Tanggul rob dan Long storage	2	Kondisi sedang, butuh perbaikan/perawatan
4	Rawa (eks sawah/lahan kosong)	15	Non produktif dimanfaatkan Nelayan PUD untuk mencari ikan (nila/mujair)
5	Sungai Betingan/ Segrabyak	2	Kondisi rusak/tenggelam

Sumber: FGD PLUP Bandengan 2021

¹³ Data profil kelurahan

¹⁴ Monografi Kelurahan Bandengan tahun 2020

Gambar 2: Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Bandengan



5. AKSESIBILITAS WILAYAH

Keadaan orbitas dan jarak tempuh Kelurahan Bandengan dengan Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah relatif mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Keterbatasan angkutan menuju Ibukota Kecamatan, Kota dan Provinsi tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah banyak tersedia..

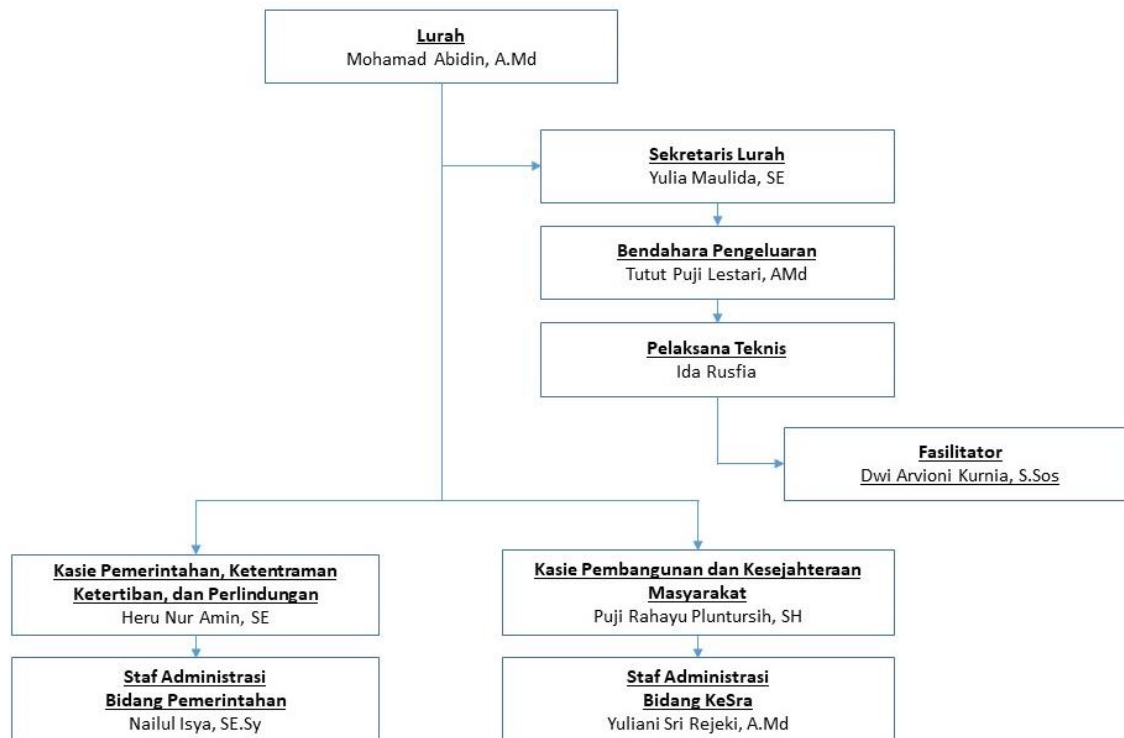
Berikut adalah letak/jarak Kelurahan Bandengan dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang ada di Kota Pekalongan::

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 3 km, dengan waktu tempuh sekitar 10 menit.
- Jarak ke Ibu Kota Pekalongan, sekitar 5 km, dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi, sekitar 98 km, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam.

6. STRUKTUR PEMERINTAH KELURAHAN BANDENGAN

Berikut adalah Struktur Pemerintah Kelurahan Bandengan berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 Tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Kota Pekalongan.

Gambar 3: Struktur Pemerintah Kelurahan Bandengan



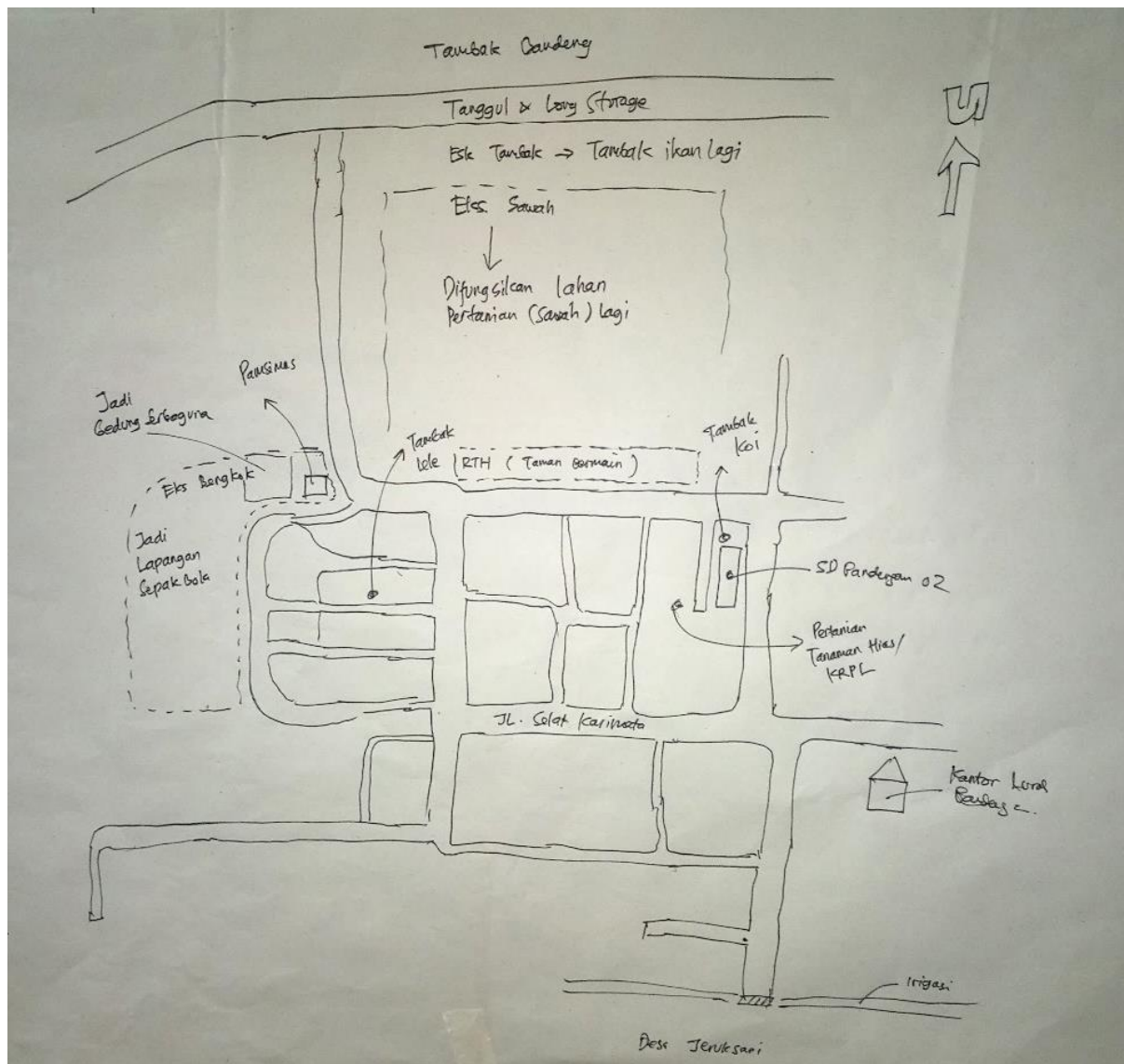
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN PLUP

1. VISI PLUP BANDENGAN

Hasil diskusi permusan visi PLUP di Kelurahan Bandengan diperoleh rumusan visi:

“Bandengan Tidak Banjir Rob, Bisa Mengolah Tambak, Masyarakatnya Makmur, Sejahtera, Maju dan Mandiri” berikut adalah peta sketsa mimpi masyarakat Bandengan:

Gambar 4: Peta Visi Masyarakat Kelurahan Bandengan



Tabel 2: Keterangan Visi Kelurahan Bandengan

No	Mimpi Warga Penggunaan Lahan Bandengan	Lokasi
1	Tanggul pemecah gelombang (Tahun 2016 masih ada setinggi ± 2m)	Utara
2	Adanya Tanggul Long Storage kuat yang menahan rob (gelombang tinggi)	Utara
3	Laut/pesisir dimanfaatkan untuk budidaya perikanan (bandeng)	Utara
4	Tambak untuk budidaya bandeng, lele, koi	Selatan Tanggul
5	Rawa dimanfaatkan untuk perikanan dan pariwisata	Selatan Tanggul
6	Sungai digunakan untuk mangrove dan green belt	Utara

2. ASET WILAYAH BANDENGAN

Untuk menilai kapasitas wilayah, dilakukan pemetaan aset kelurahan sebagai modal sebuah wilayah dalam mengembangkan wilayahnya. Asset wilayah yang dipetakan mencakup 5 aset (asset pentagonal) yang mempengaruhi livelihood masyarakatnya. Kelima sumberdaya (asset pentagonal) tersebut mencakup: (i) Aset sumberdaya alam (SDA); (ii) Aset Sumberdaya Manusia (SDM); (iii) Aset Sumberdaya Buatan (SDB) atau Sarana-prasarana serta jaringan wilayah; (iv) Aset modal sosial (social capital); dan (v) Aset Sumberdaya ekonomi (SDE), mencakup komoditas barang dan jasa serta Lembaga ekonomi.

Dalam konteks PLUP in, asset yang dipetakan adalah asset wilayah kelurahan yang sensitif terhadap perubahan iklim.

1. SUMBER DAYA ALAM KELURAHAN BANDENGAN

Jenis sumberdaya alam (SDA) yang sensitif (terdampak/terpapar) dari perubahan iklim, seperti rob dan banjir di Kelurahan Bandengan mencakup sumberdaya alam alami maupun buatan. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, adanya perubahan iklim menyebabkan gangguan pada beberapa jenis sumberdaya alam seperti pantai, sungai, tambak, sawah, rawa-rawa dan lahan bengkok. Berikut adalah tabel beberapa jenis sumberdaya alam (alami/buatan) yang sensitive terhadap perubahan iklim di Kelurahan Bandengan.

Tabel 3: Jenis Aset SDA Sensitif Perubahan Iklim Kelurahan Bandengan

No	Jenis SDA	Jml	Luas	Lokasi (Dusun)	Keterangan
1	Tambak bandeng	20	20 Ha	Utara tanggul Bandengan	Kondisi Baik dan Masih Produktif
2	Tambak nila (eks sawah)		30 Ha	Selatan tanggul Bandengan	Kondisi Rusak
3	Tambak Ikan koi	1	150 M ²	RT 02 RW 06	Kondisi Baik
4	Tambak lele	1	150 M ²	RT 04 RW 06	Kondisi Baik
5	Rawa (eks sawah)	n.a	20 Ha	RW 7 dan RW 8	Rusak (parah)
7	Laut/pesisir	1	1 Km	Utara Tanggul	Kondisi Rusak/Rob (Penanaman Mangrove)
8	Rawa (eks lahan kosong)	n.a	5 Ha	RW 01-06	Kondisi Banjir Rob
9	Eks bengkok (rawa)	18	n.a	RW 04, 05, 06	Kondisi Banjir Rob
11	Sungai Betingan/Segrabyak	1	2 Ha	Utara tanggul	Kondisi rusak/tenggelam

2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KELURAHAN BANDENGAN

Sumberdaya manusia yang dimaksud dalam pemetaan ini adalah jenis sumberdaya manusia yang rentan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, bahwa jenis pekerjaan yang sensitive terhadap perubahan iklim di Kelurahan Bandengan antara lain nelayan, petani tambak, petani sawah, buruh, jasa tukang becak dan tukang bangunan serta pedagang.

Berdasarkan jenis pekerjaan yang paling banyak terpapar akibat perubahan iklim (banjir dan rob) adalah buruh batik dan konveksi, pedagang, kuli bangunan, dan petani tambak serta sawah. Berikut adalah tabel jenis pekerjaan masyarakat Bandengan yang terdampak perubahan iklim (banjir dan rob).

Tabel 4: Jenis pekerjaan masyarakat Bandengan yang sensitive terhadap perubahan iklim

No	Jenis Profesi	Perkiraan Jml (org)	Lokasi	Keterangan
1	Petani tambak jaring	± 200	RW 06	Ikan nila, mujair (koi hanya 1 pembudiya dan tidak terdampak langsung)
2	Buruh bangunan	± 50	RW 06	
3	Karyawan Swasta	± 200	RW 06	Buruh Pabrik
4	Nelayan	± 100	RW 06	Nelayan Kecil
5	Buruh Jahit	± 25	RW 06	Daster
6	Pedagang	± 100	RW 06	
7	Buruh Batik	± 5	RT 04 RW 06	
8	Pengolahan Terasi	± 3	RT 02 RW 06	
9	Produksi Telur Asin	± 1	RT 03 RW 06	
10	Perbaikan Jaring	± 25	RW 06	
11	Petani Ikan Hias	± 12	RW 06	
12	Tanaman Hias	± 4	RT 02 RW 06	

13	Pengolahan Ikan (Pindang)	± 1	RT 02 RW 06	
14	Rongsok	± 2	RT 02, 04 RW 06	

Sementara sumberdaya manusia Kelurahan Bandengan yang sensitif terhadap perubahan iklim, berdasarkan kelompok umur dan status kerentaannya adalah kelompok ibu hamil dan menyusui, kelompok Balita, kelompok lansia, kelompok disabilitas dan Anak-anak.

Berdasarkan tingkat kerentanan kelompok masyarakat, menunjukkan bahwa kelompok Balita dan Anak-anak paling mendominasi di Kelurahan Bandengan, kemudian kelompok lansia, selanjutnya kelompok disabilitas dan kelompok ibu hamil yang paling rentan terhadap akibat banjir dan rob (termasuk Covid 19). Berikut adalah tabel kelompok rentan terhadap perubahan iklim Kelurahan Bandengan:

Tabel 5: Kelompok rentan terhadap perubahan iklim (ancaman rob dan banjir) Kelurahan Bandengan

No	Kelompok Umur	Jml (jiwa)	Lokasi (RW)	Keterangan
1	Ibu Hamil	± 30	1-6	Peningkatan pelayanan Posyandu
2	Balita	± 420	1-6	Peningkatan pelayanan Posyandu
3	Lansia	± 314	1-6	Usia 60 Tahun Keatas (Memerlukan posyandu lansia)
4	Disabilitas	± 33	1-6	Memerlukan sarana pendukung (Tuna rungu wicara, difabel, ODGJ)
5	Petani tambak	± 300	4,5,6	Petambak nila dan bandeng
6	Pedagang	± 160	1-6	Pedagang kecil dan keliling, sembako
7	Peternak unggas	± 25	6	Daging dan telur (Bebek dana yam)
8	Nelayan Kecil	± 100	3 – 6	Nelayan rebon, kepiting, udang, ikan

3. SUMBER DAYA BUATAN: SARANA PRASARANA WILAYAH BANDENGAN

Sumberdaya Buatan (SDB) adalah sarana dan prasarana serta jaringan dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana memudahkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (*livelihood*). Dalam pemetaan sumberdaya buatan (SDB) ini adalah sarana dan prasarana masyarakat dan wilayah yang keberadaanya terdampak akibat rob dan banjir (perubahan iklim).

Berdasarkan hasil pemetaan dalam PLUP yang dilakukan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang terdampak akibat rob dan banjir mencakup rumah dan sarana permukiman warga, jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, sarana olah raga, fasilitas pemakaman, sarana usaha seperti tambak, kolam ikan, hingga perlengkapan nelayan seperti pearhu, mesin dan jarring.

Disamping fasilitas diatas, tanggul sungai dan tanggul laut pun mengalami kerusakan, yang sat ini sedang dalam proses perbaikan, termasuk mesin pompa penyedot air juga mengalami kerusakan. Berikut adalah tabel sarana dan prasarana serta jaringan yang terdampak akibat banjir dan rob di Kelurahan Bandengan.

Tabel 6: Sumberdaya Buatan Yang Terpapar Akibat Banjir dan Rob di Kelurahan Bandengan

No	Jenis SDB	Jumlah	Kondisi	Lokasi (RW)	Keterangan
1	Jalan	-250 m -200 m	Baik Rusak	06 03 dan 06	RT 01,02,04,05 -Tenggelam
2	Perumahan	300 unit	Rusak sebagian	RW 01 - 06	RTLH (Peninggian ± 50-70 cm)
3	Masjid dan Musholla	2 unit 8 unit	Baik	RW 01 - 06	1 Rehab Total
4	SD dan MSI	3 unit	Baik	Kelurahan	
5	Posyandu	7 unit	Baik	RW 01 - 06	Induk Rumah Kader (1 Posyandu Lansia)
6	MCK	5 unit	Rusak	RW 01 - 06	Kekurangan Air Bersih
7	Pamsimas	4 unit	Rusak	RW 02,04,05,06	Rusak Jaringan Air
8	Jembatan	6 unit	1 baik, 5 rusak	Kelurahan	Terendam perlu peninggian
9	Rumah Pompa	1 unit	Baik	06	Perlu tambah Pompa
10	Tanggul	2 Km	Rusak	06	Terkikis / Abrasi
11	Perahu kecil	20 unit	Baik	06	Sebagian perlu perbaikan Perlu penambahan mesin
12	Jaring	50 unit	Rusak	06	Perlu pembaharuan bahan
13	Irigasi/selokan/ drainase	2500 m	Rusak	Kelurahan	Tertutup lumpur

4. SUMBER DAYA SOSIAL (MODAL SOSIAL)

Modal sosial merupakan adalah nilai-nilai dan/atau kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan sosial lainnya yang keberadaannya mendukung kesejahteraan masyarakat. Modal sosial ini dapat berbentuk sikap saling percaya, kekerabatan, sikap tolong-menolong, gotong-royong dll, yang berfungsi dalam proses meringankan dan atau/menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam banyak hal modal sosial di masyarakat menjadi jarring pengaman sosial satu sisi dan sebagai instrument masyarakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Modal sosial ini ada yang bersumber dari nilai-nilai agama, ada pula dari kebiasaan (budaya) masyarakat, dan dalam perwujudannya ada yang melembaga secara formal ada pula yang non formal. Modal sosial ini dalam kontek kebencanaan, mendukung kapasitas resiliensi masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan modal sosial dalam workshop PLUP, diperoleh beberapa jenis modal sosial yang masih cukup banyak, dan aktif sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 7: Modal sosial (SDS) Masyarakat yang Mendukung resiliensi masyarakat Bandengan.

No	Jenis Modal Sosial	Jumlah	Peran (skor1-3)	Lokasi (RW)	Keterangan
1	Jamaah Yasinan	5 RT	1	RW 06	-Kebersihan Lingkungan -Membersihkan Sungai
2	Kematian / Lelayu	5 RT	1	RW 06	Yasin Tahlil Sumbangan Jariah
3	Gotong Royong	5 RT	1	RW 06	-Sambatan Rumah -Pembangunan Sarpras
4	Bansos	5 RT	1	RW 06	Pemerintah, LSM, Donatur

No	Jenis Modal Sosial	Jumlah	Peran (skor1-3)	Lokasi (RW)	Keterangan
5	Kesehatan	5 RT	1	RW 06	BPJS, Vaksinasi, Jamkesmas
6	Posyandu	1	1	RW 06	Balita Lansia
7	Santunan Anak Yatim	5 RT	1	RW 06	Bulan Muharam
8	Bedah Rumah	9 Unit	3	RW 06	

5. SUMBER DAYA EKONOMI (ASET EKONOMI MASYARAKAT)

Asset ekonomi (sumberdaya ekonomi) adalah komodtas, barang baik yang diproduksi, konsumsi maupun yang dijual, dan jasa serta lembaga ekonomi yang mendukung pendapatan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemetaan sumberdaya ekonomi dari workshop PLUP ini, diperoleh banyak sumberdaya ekonomi, seperti komoditas hasil perikanan, hasil tambak dan kolam, industri batik, dan sebagaian jasa.

Dalam mengakses permodalan, masyarakat menggunakan jasa permodalan dari perbankan dan Lembaga keuangan nonbank. Berikut adalah tabel sumberdaya ekonomi Bandengan yang dinilai cukup dominan dan bernilai ekonomi signifikan bagi masyarakat:

Tabel 8: Jenis Komoditas (SDE) yang dihasilkan Masyarakat Bandengan

No	Komoditas (Dijual)	Jumlah (kg/thn)	Harga/kg (x1000)		Total (Rp/hr) x1000		Jalur Pemasaran
			Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	
1	Ikan Nila	± 3.600	1	3	50	150	Pengepul
2	Ikan Mujair	± 3.600	1	1,2	50	100	Pengepul
3	Ikan Gabus	± 580					Pengepul
4	Kepiting	± 360	1	4	20	40	Pengepul
5	Bandeng	± 4.500	1	1,5	5.625	7.500	Pengepul
Total:							

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa perputaran uang di Kelurahan Bandengan dalam sehari rerata berkisar antara 200an juta rupiah. Jika saat ini jumlah KK di Kelurahan Bandengan sekitar 1.619 KK, maka setiap hari rata-rata pendapatan adalah Rp. 100.000/KK/hari (bruto), belum dikurangi oleh biaya produksi seperti BBM maupun bahan-bahan lain. Jumlah pendapatan ini bisa lebih besar apabila terjadi kenaikan harga pada barang-barang produksi mereka. Berdasarkan data ini, kira-kira pendapatan bulanan masyarakat Kelurahan Bandengan sekitar Rp. 3.000.000/bulan.

Selain barang yang dijual, dalam proses PLUP ini juga dilakukan identifikasi jenis barang yang dibeli (dikonsumsi) oleh masyarakat Bandengan, baik dari kelurahan maupun dari luar kelurahan. Berikut ini adalah tabel hasil identifikasi jenis barang/komoditas yang dibeli (dikonsumsi) oleh rumah tangga/masyarakat Bandengan.

Tabel 9: Jenis Barang/Komoditas Yang Dibeli (dikonsumsi setiap hari) oleh Masyarakat Bandengan

No	Jenis Komoditas (dibeli)	Daya Beli	Rp/Satuan (x1000)	Biaya/bl (x1000)	Biaya (Rp/hr)	Dibeli Dari
1	Beras	25 kg/bl	11/kg	275	9.200	Warung Tetangga
2	Sayuran	15 kg/bl	5/kg	75	2.500	Warung Tetangga
3	Gas LPJ	4 tabung/bl	20/tabung	80	2.700	Warung Tetangga
4	Listrik	100.000/bl	100	100	3.400	Toko Tetangga
5	Air	150.000/bl	150	150	5.000	PDAM/PAMSIMAS
6	Ayam Potong	6 kg/bl	40/kg	240	8.000	Pedagang Kliling
7	Ikan Basah	15 kg/bl	20/kg	300	10.000	Pedagang Keliling
8	Bbm	30 liter/bl	10/lt	300	10.000	SPBU/Pdg. eceran
Total:					50.800/KK	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa konsumsi harian masyarakat setiap KK adalah Rp. 50.800/hari, sehingga dalam satu bulan kebutuhan konsumsi untuk keperluan pokok sekitar Rp. 1.524.000/KK/bulan.

Berdasarkan jumlah rerata pendapatan setiap keluarga, maka pengeluaran/bulan masyarakat rerata menyerap sekitar 50% untuk keperluan konsumsi. Data ini adalah angka perkiraan, karena sebagaimana disebutkan diatas bahwa pendapatan perkeluarga belum dikurangi biaya produksi lainnya. Jika merujuk pada data ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Kelurahan Bandengan masih surplus pada waktu tidak banjir atau rob.

3. PERUBAHAN DAN KECENDERUNGAN TATA GUNA LAHAN

Pemetaan situasi tata guna lahan dilakukan untuk melihat perubahan dan kecenderungan tata guna lahan kelurahan di Bandengan.

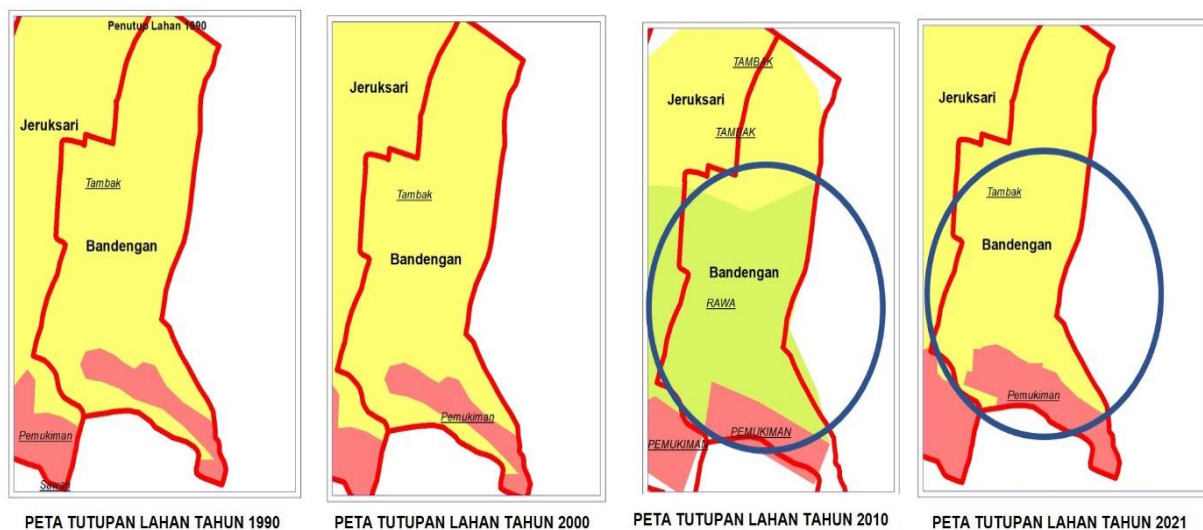
Berdasarkan hasil olahan data tutupan lahan Kelurahan Bandengan, yang dipresentasikan pada acara PLUP oleh tim GIS, menunjukkan bahwa perubahan kawasan tata guna lahan Kelurahan Bandengan mulai tahun 1990, tahun 2000, tahun 2021 menunjukkan perubahan tata guna lahan yang cukup signifikan dari 108,66 Ha sawah tahun 1990an sekarang 108,66 menjadi rawa. Perubahan tata guna lahan ini dipengaruhi oleh naiknya air laut (rob) sehingga menenggelamkan areal pertambakan, persawahan dan perumukiman.

kawasan terjadi signifikan mulai tahun 2000–2021. Perubahan yang terjadi didominasi naiknya air laut yang semakin parah sehingga menenggelamkan areal pertambakan, persawahan, dan terakhir kawasan pemukiman.

Diprediksikan situasi ini akan terus bertambah, apabila penanganan rob dan banjir di Kelurahan Bandengan tidak maksimal, dan pada gilirannya dapat menjadikan areal permukiman berubah menjadi genangan air laut. Berikut ini adalah peta perubahan tutupan lahan Kelurahan Bandengan tahun 1990, tahun 2000, 2010 dan tahun 2021.

Gambar 5: Peta Perubahan Penutupan Lahan 1990, 2000, 2010, 2021 Kelurahan Bandengan

PERUBAHAN PENUTUP LAHAN 1990 , 2000, 2010 DAN 2021 DI KELURAHAN BANDENGAN



Peta perubahan tutupan lahan yang terjadi di Kelurahan Bandengan berdasarkan peta dari KLHK. Perubahan terlihat dimulai dari tahun 2010 yang sebelumnya merupakan daerah tambak menjadi rawa karena adanya banjir rob yang terjadi hampir setiap tahun kemudian di tahun 2021 Kembali bisa dijadikan tambak.

Hasil presentasi olahan peta perubahan tutupan lahan ini, kemudian dilakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) yakni pembacaan peta didapat informasi dari masyarakat dalam workshop PLUP, dengan merujuk pada pembacaan situasi peta tahun 1990, tahun 2000 dan tahun 2021.

Dari hasil pembacaan tersebut, diperoleh informasi bahwa Kelurahan Bandengan dalam kurun sekitar 30an tahun (1990-2021) telah terjadi perubahan tutupan lahan yang sangat ekstrim, pada tambak, hutan mangrove, rawa, sawah, sungai dan pantai.

Perubahan tutupan lahan ini ada yang hingga 100%, seperti sawah dan sebagian besar berubah menjadi rawa-rawa. Secara detil perubahan situasi tutupan lahan Kelurahan Bandengan ditaungkan dalam tabel berikut:

Tabel 10: Perubahan Tutupan Lahan Jenis SDA Kelurahan Bandengan (1990, 2000, 2021)

No	Jenis SDA	1990	2000	2010	2021	Keterangan
1	Tambak	Baik	Baik	Berkurang	±20 Ha	Pada tahun 2021 Tambak yang Produktif ± 20 Ha sedangkan ± 151,66 Ha Tidak Produktif
2	Sawah	± 50 Ha	Baik	Berkurang	Habis	Terkena Rob dan Banjir
3	Kebun Melati	± 30 Ha	Baik	Bekurang	Habis	Terkena Rob dan banjir
4	Laut	± 2-3 Km	Baik	Baik	Hilang	Tidak ada pesisir
5	Sungai kecil/irigasi	± 2M	Baik	Baik	Rusak	Tambah Dangkal
6	Mangrove	Baik	Baik	Berkurang	Hilang	Konservasi Kepiting, Burung, Ikan
7	Kebun Pandan Duri	Baik	Baik	Berkurang	Hilang	Terkena Rob & Banjir
8	Kebun Kelapa	± 2 Ha	Baik	Baik	Habis	Terkena Rob & Banjir
9	Peternakan 1.Kerbau dan sapi 2.Kambing 3.Bebek/ungags 4.Telur Bebek	Produktif ± 500 Ekor ± 200 Ekor ± 4000 Ekor Baik	Produktif Baik Baik Baik Baik	Produktif Baik Baik Baik Baik	Berkurang Habis Berkurang Baik Baik	Hanya kambing yang bertahan Bebek ±700 ekor
10	Perkebunan 1.Pisang 2.Mangga	Baik 5 Ha	Baik	-	-	Terkena banjir rob

4. PERMASALAHAN KELURAHAN BANDENGAN

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hasil identifikasi masalah¹⁵ yang dinilai menyebabkan masyarakat kurang sejahtera di Kelurahan Bandengan adalah sebagai berikut:

- Pengangguran meningkat
- Gangguan saluran air bersih/PDAM/Pamsimas karena banjir rob
- Berkurangnya Tangkapan ikan
- Kurangnya alat tangkap ikan
- Penerangan jalan banyak yang rusak
- Kerusakan drainase dan infrastruktur lainnya
- Timbul berbagai macam masalah sosial (KDRT, Kenakalan Remaja)
- Masalah kesehatan masyarakat terserang penyakit gatal-gatal, flu dan diare
- Kerusakan Property dan kendaraan akibat banjir rob
- Menurunnya ekonomi dari perdagangan dan peternakan.
- Ditebangnya pohon alami seperti pandan duri, druju dan daon (bulung) sebagai penguat tanggul alami disisi kanan kiri sungai dan kisik (pesisir)
- Bibir Pantai yang semakin tergerus karena ROB
- Aliran air sungai tidak bisa terbuang ke laut sehingga air meluap
- Kebun melati yang sudah hilang tak berbekas karena lahan terendam ROB
- Penebangan tanaman mangrove pada waktu booming udang pada tahun 1990an.
- Susahnya melakukan penanaman mangrove karena genangan air yang sudah dalam
- Dimatikannya aliran Sungai Betengan sebagai tanggul alami tambak dan sawah menyebabkan genangan air pada waktu banjir rob, air tidak bisa mengalir ke laut
- Tambak yang produktif bisa di hitung jari karena dampak ROB dan luapan air sungai pada waktu musim penghujan air tidak dapat mengalir ke laut
- Perubahan kondisi lingkungan yang disebabkan oleh ROB membuat produktivitas hasil tambak menurun
- Faktor banjir rob mengakibatkan jumlah ikan dan jenis ikan yang menurun
- Sawah hilang karena tergenang oleh air rob
- Rawa – rawa yang semakin tergenang oleh air dan meluap
- Belum di manfaatkannya potensi perikanan di rawa-rawa secara optimal
- Berkurangnya daerah resapan air
- Wilayah Bandengan yang sesuai Tata Kota diperuntukan untuk Pelabuhan Peti Kemas dan pemukiman (Industrial) masyarakat tidak dapat mengelola tambak rencana tata ruang Kota Pekalongan
- Tingkat pengetahuan yang rendah
- Angka putus sekolah yang tinggi
- Masih adanya masyarakat yang buta huruf

¹⁵ Sebagian hasil pemetaan masalah bersumber dari hasil RRA Kelurahan Bandengan, September 2021

- IPM yang masih rendah hal ini ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya
- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat kesulitan mencari pekerjaan
- Kurangnya tenaga pendidik
- Tenaga medis masih dari luar
- Dampak perubahan iklim yang membuat masyarakat kehilangan pekerjaan
- Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia
- Kurangnya pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM
- Keterampilan khusus yang dimiliki masih rendah
- Kurangnya kursus keterampilan
- Masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengolah sumberdaya alam (tambak, rawa-rawa), sehingga menjadikan ekonominya bertumpu pekerjaan buruh kasar (bongkar muat/kuli bangunan/buruh industri/tukang parkir dll)
- Akses jalan banyak yang rusak
- Jalan bisa terputus saat ROB
- Drainase tidak berfungsi karena kurang terawat dan banyak sampah menyumbat
- Tidak punya pompa pembuangan air untuk mengalirkan air ke laut (rumah pompa)
- Pompa (Rumah Pompa Pabean) yang ada pada saat sekarang sudah jarang beroperasi dan tidak mampu membuang air apalagi ketika musim penghujan
- Bangunan tanggul rob (tanggul raksasa) sebelah utara sudah mulai kritis terkikis oleh hempasan gelombang pasang (rob)
- Tidak ada pintu (kelep) pada tanggul raksasa sehingga ketika ada banjir hujan dari selatan air tidak bisa keluar ke utara (laut).
- Jaringan internet ada di 3 RW tapi kurang perawatan
- TPST tidak sanggup menampung semua sampah
- Tidak ada tempat sampah dimasing-masing RT
- Kekurangan gerobak sampah
- Sebagian besar Rumah tangga tidak punya fasilitas sanitasi MCK
- Kekurangan MCK Komunal
- Kekurangan sarana air bersih karena pipa PAMSIMAS terlalu dalam sehingga pasokan air bersih ke warga tidak memadai, sedangkan PDAM mahal
- Banyak rumah tidak layak huni akibat genangan air dimana-mana, warga tidak bisa pindah rumah karena tidak mempunyai biaya
- Fasilitas kesehatan yang kurang memadai
- Banyaknya lembaga desa yang belum pro aktif dalam penanganan banjir rob
- Belum bersatunya semua lapisan masyarakat dalam mensikapi perubahan iklim
- Masih kurangnya penyuluhan dan edukasi tentang pencegahan bencana ROB
- Pembentukan kelompok pembudidaya / nelayan masih berorientasi bantuan
- Kurangnya pendampingan untuk kelompok nelayan dan petani tambak
- Kurangnya pelatihan kelembagaan kelompok
- Kelompok yang ada masih berorientasi pada program bantuan pemerintah
- Kelompok masih berjalan sendiri-sendiri belum ada sinergi antar kelompok

- Produktivitas budidaya ikan menurun
- Penghasilan nelayan dan tambak semakin lama menurun
- Harga ikan yang murah
- Harga pakan ikan yang tinggi
- Upah jahit yang murah per Pcs Rp 2.500
- Upah buruh batik yang murah
- Harga alat tangkap yang mahal
- Belum ada diversifikasi usaha untuk olahan hasil tambak / laut
- Belum ada pasar lokal (ikan) sehingga kegiatan jual beli hasil laut/tambak dijual ke wilayah lain sehingga biaya operasional semakin besar
- Kekurangan modal usaha untuk budidaya tambak dan laut
- Belum adanya akses keuangan
- Belum adanya skema dan rencana bisnis yang matang untuk pengembangan bisnis
- Masih kurangnya pelatihan untuk badan usaha
- Belum terkelolanya potensi alam untuk pengembangan usaha masyarakat seperti pengelolaan wisata pesisir

8. ISU STRATEGIS BANDENGAN

Proses analisis dalam PLUP ini dilakukn dengan metode *clustering*, yakni sebuah proses analisis yang dilakukan dengan membuat perumpunan atas masalah-masalah yang dipetakan dengan memperhatikan kesamaan masalah/isu. Dalam proses pengelompokan masalah ini kemudian dilakukan perumusan isu strategis. Berikut adalah hasil perumusan isu strategis:

Tabel 11: Pengelompokan isu strategis Kelurahan Bandengan

No	Jenis Masalah	Kelompok Isu Strategis
1	- Tidak adanya lagi tanggul alami di bibir pantai sebagai penghalang. - Bibir Pantai yang semakin tergerus karena ROB - Susahnya melakukan penanaman mangrove karena genangan air yang sudah dalam - Dimatikannya aliran Sungai Betengan sebagai tanggul alami tambak dan sawah - Tambak yang produktif bisa di hitung jari karena dampak ROB dan luapan air sungai - Akses jalan banyak yang rusak - Jalan bisa terputus saat ROB - Kerusakan drainase dan infrastruktur lainnya - Kerusakan Property dan kendaraan - Drainase tidak berfungsi karena kurang terawat dan banyak sampah menyumbat - Tidak punya pompa pembuangan air untuk mengalirkan air ke laut (rumah pompa) - Pompa (Rumah Pompa Bandengan) yang ada pada saat sekarang sudah jarang beroperasi dan tidak mampu membuang air apalagi ketika musim penghujan	Kebijakan penanggulangan rob/banjir yang belum maksimal

No	Jenis Masalah	Kelompok Isu Strategis
	- Bangunan tanggul rob (tanggul raksasa) sebelah utara sdh mulai kritis - Tidak ada pintu (kelep) pada tanggul raksasa sehingga ketika ada banjir hujan dari selatan air tidak bisa keluar ke utara (laut). - Sawah hilang karena tergenang oleh air rob - Rawa-rawa yang semakin tergenang oleh air dan meluap	
2	- Gangguan saluran air bersih/PDAM/Pamsimas - Tidak adanya daerah resapan air - Berkurangnya daerah resapan air	Krisis pengelolaan air bersih
3	- Penerangan jalan banyak yang rusak - Kerusakan drainase dan infrastruktur lainnya - Masalah kesehatan masyarakat terserang penyakit gatal2, flu & diare - Kurangnya tenaga pendidik - Tenaga medis masih dari luar - Jaringan internet ada di 3 RW tapi kurang perawatan - TPST tidak sanggup menampung semua sampah - Tidak ada tempat sampah dimasing-masing RT - Kekurangan gerobak sampah - Sebagian besar Rumah tangga tidak punya fasilitas sanitasi MCK - Kekurangan MCK Komunal - Kekurangan sarana air bersih karena pipa PAMSIMAS terlalu dalam - Banyak rumah tidak layak huni akibat genangan air dimana-mana - Fasilitas kesehatan yang kurang memadai	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial.
4	- Kekurangan modal usaha untuk budidaya tambak dan laut - Belum adanya akses keuangan - Belum adanya skema bisnis dan rencana bisnis yang matang untuk pengembangan bisnis - Kekurangan modal usaha untuk budidaya tambak dan laut - Harga ikan yang murah - Harga pakan ikan yang tinggi - Harga alat tangkap yang mahal	Lemahnya kelembagaan ekonomi & akses permodalan masyarakat
5	- Penghasilan nelayan dan tambak semakin lama menurun - Upah jahit yang murah - Upah buruh batik yang murah	Kebijakan pemerintah yg kurang berpihak pd petani, sektor pertanian dan usaha domestik
6	- Penebangan tanaman mangrove pada waktu booming udang pada tahun 1990an. - Belum bersatunya semua lapisan masyarakat dalam menyikapi perubahan iklim - Kurangnya kesadaran masyarakat yg membuang sampah pd tempatnya	Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian SDA dan SDB
7	- Pengangguran meningkat - Timbul berbagai macam masalah sosial (KDRT, Kenakalan Remaja) - Tingkat pengetahuan yang rendah - Angka putus sekolah yang tinggi - Masih adanya masyarakat yang buta huruf	Rendahnya tingkat pendidikan & kapasitas masyarakat dalam budidaya pertanian

No	Jenis Masalah	Kelompok Isu Strategis
	- IPM yang masih rendah hal ini ditunjukkan dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun - Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat kesulitan mencari pekerjaan - Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia - Kurangnya pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM - Keterampilan khusus yang dimiliki masih rendah - Kurangnya kursus keterampilan - Masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengolah sumberdaya alam (tambak, rawa-rawa), sehingga menjadikan ekonominya bertumpu pekerjaan buruh kasar (bongkar muat/kuli bangunan/buruh industri/tukang parkir dll) - Belum terkelolanya potensi alam untuk pengembangan usaha masyarakat seperti pengelolaan wisata pesisir - Belum ada diversifikasi usaha untuk olahan hasil tambak / laut - Belum ada pasar lokal (ikan) sehingga kegiatan jual beli hasil laut/tambak dijual ke wilayah lain sehingga biaya operasional semakin besar	dan pengembangan wisata
8	- Banyaknya lembaga desa belum proaktif dlm penanganan banjir rob - Masih kurangnya penyuluhan dan edukasi tentang pencegahan bencana ROB - Pembentukan klp. pembudidaya/nelayan masih berorientasi bantuan - Kurangnya pendampingan untuk kelompok nelayan & petani tambak - Kurangnya pelatihan kelembagaan kelompok - Kelompok yang ada masih berorientasi pada program bantuan pemerintah - Kelompok masih berjalan sendiri2, belum ada sinergi antar kelompok	Lemahnya kelembagaan masyarakat (kelurahan)
9	- Berkurangnya Tangkapan ikan - Produktivitas padi menurun (sawah menjadi rawa) - Jumlah ikan dan jenis ikan yang menurun - Perubahan kondisi lingkungan yang disebabkan oleh ROB membuat produktivitas hasil tambak menurun - Produktivitas budidaya ikan menurun - Dampak perubahan iklim yg membuat masy. kehilangan pekerjaan	Perubahan iklim tidak menentu dan degradasi lingkungan kota

Berdasarkan hasil pengelompokan masalah di atas, disimpulkan bahwa isu strategis yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kelurahan Bandengan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan penanggulangan rob/banjir yang belum maksimal
2. Krisis pengelolaan air bersih
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial.
4. Lemahnya kelembagaan ekonomi dan akses permodalan masyarakat
5. Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada petani dan sektor pertanian dan usaha domestik
6. Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian SDA dan SDB
7. Rendahnya tingkat pendidikan & kapasitas masyarakat dalam budidaya pertanian

- 8. Lemahnya kelembagaan masyarakat (kelurahan)
- 9. Perubahan iklim tidak menentu dan degradasi lingkungan kota

2. PRIORITAS ISU STRATEGIS

Dalam mendapatkan prioritas penanganan isu strategis di Kelurahan Bandengan, dilakukan analisis prioritas melalui skoring tingkat pengaruh/dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari masing-masing isu strategis yang diperoleh. Skoring tingkat pengaruh dibuat dengan menggunakan skala likert, 5,4,3,2 dan 1, dimana masing skor bermakna:

- Skor 5, menunjukkan dampak sangat besar, dan mempengaruhi banyak orang
- Skor 4, menunjukkan dampak cukup besar, mempengaruhi banyak orang/banyak kelompok
- Skor 3, menunjukkan dampak sekitar 50% dari masyarakat/kelompok masyarakat
- Skor 2, menunjukkan dampak kecil/sedikit kelompok/orang
- Skor 1, menunjukkan dampak sangat kecil/ 1 kelompok masyarakat

Berdasarkan hasil pleno dan konsultasi hasil skoring diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 12: Hasil Penilaian (Skoring) Prioritas Akar Masalah Kelurahan Bandengan

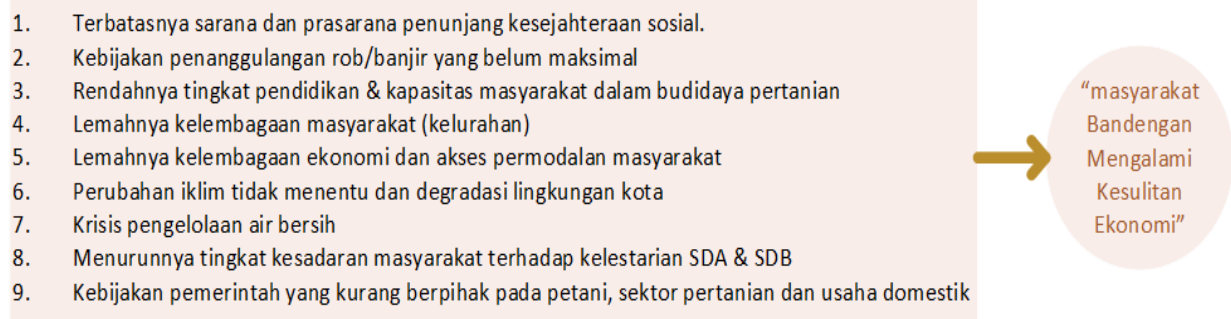
Jenis Akar Masalah	Skor	Rangking
Kebijakan penanggulangan rob/banjir yang belum maksimal	14	ke-2
Krisis pengelolaan air bersih	8	ke-7
Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial.	15	ke-1
Lemahnya kelembagaan ekonomi dan akses permodalan masyarakat	11	ke-5
Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada petani, sektor pertanian dan usaha domestik	6	ke-9
Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian SDA & SDB	7,5	ke-8
Rendahnya tingkat pendidikan & kapasitas masyarakat dalam budidaya pertanian	13	ke-3
Lemahnya kelembagaan masyarakat (kelurahan)	12	ke-4
Perubahan iklim tidak menentu dan degradasi lingkungan kota	10,5	ke-6

Keterangan: jumlah skor bersumber dari hasil akumulasi skoring dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan pada saat FGD-PLUP

Merujuk dari tabel di atas, maka susunan isu strategis Kelurahan Bandengan adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial.
2. Kebijakan penanggulangan rob/banjir yang belum maksimal
3. Rendahnya tingkat pendidikan & kapasitas masyarakat dalam budidaya pertanian
4. Lemahnya kelembagaan masyarakat (kelurahan)
5. Lemahnya kelembagaan ekonomi dan akses permodalan masyarakat
6. Perubahan iklim tidak menentu dan degradasi lingkungan kota
7. Krisis pengelolaan air bersih
8. Menurunnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian SDA & SDB
9. Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada petani, sektor pertanian dan usaha domestik

Gambar 6: Diagram Isu strategis dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Bandengan



BAB IV. ZONASI & ARAHAN PENGELOLAAN

1. ZONASI WILAYAH BANDENGAN

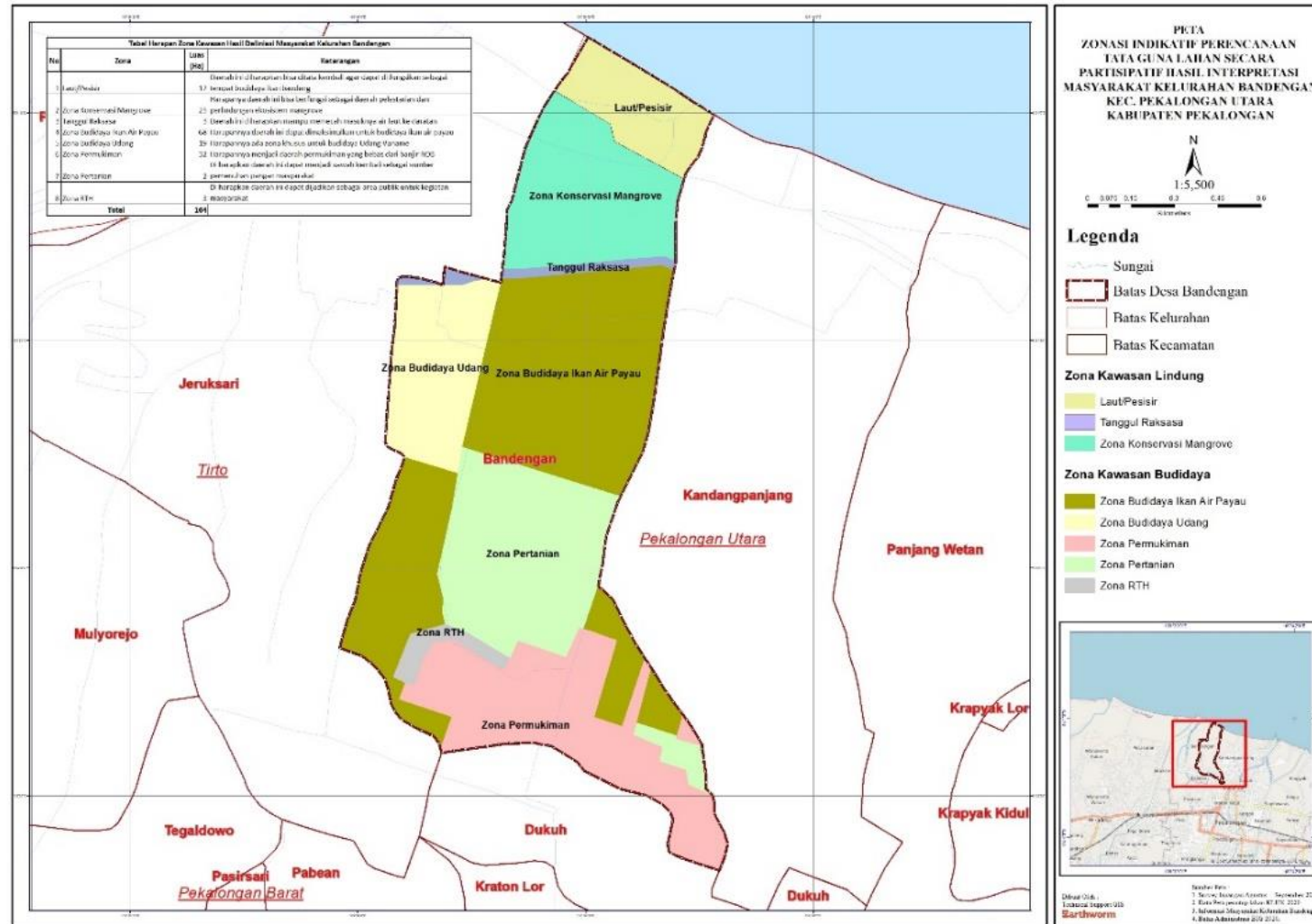
Memperhatikan atas visi PLUP, situasi tata guna lahan yang ada, perubahan tata guna lahan yang terjadi dari tahun ke tahun, serta isu strategis yang diperoleh, masyarakat menilai penting untuk ditentukannya zonasi pengelolaan, baik untuk fungsi lindung maupun budidaya. Zonasi pengelolaan ini kemudian menjadi arahan pemanfaatan lebih lanjut terhadap tata guna lahan sebagai bagian dari pemanfaatan atas ruang wilayah kelurahan.

Merujuk pada 6 jenis sumberdaya alam yang dinilai penting, masing-masing diarahkan untuk fungsi lindung/pemanfaatan terbatas adalah mangrove, sungai, dan pantai. Sementara 3 jenis sumberdaya alam lainnya untuk fungsi budidaya, yakni tambak, rawa, pantai dan sawah. Secara detail arahan pengelolaan untuk masing-masing jenis sumberdaya alam tersebut adalah:

1. Laut/Pesisir, diarahkan untuk penahan gelombang pasang/tinggi, hutan mangrove dan budidaya tambak bandeng.
2. Tanggul Rob Dan Long Storage, diarahkan untuk penahan gelombang pasang/rob.
3. Tambak diarahkan untuk budidaya ikan bandeng, nila, udang vanami.
4. Rawa, diarahkan untuk pengembangan tambak, pemancingan dan wisata masyarakat.
5. Sungai, diarahkan untuk pengembangan mangrove dan green belt.

Berikut adalah peta zonasi arahan pengelolaan atas tata guna lahan Kelurahan Bandengan

Gambar 7: Peta Zonasi Arahan Pengelolaan Tata Guna Lahan Kelurahan Bandengan



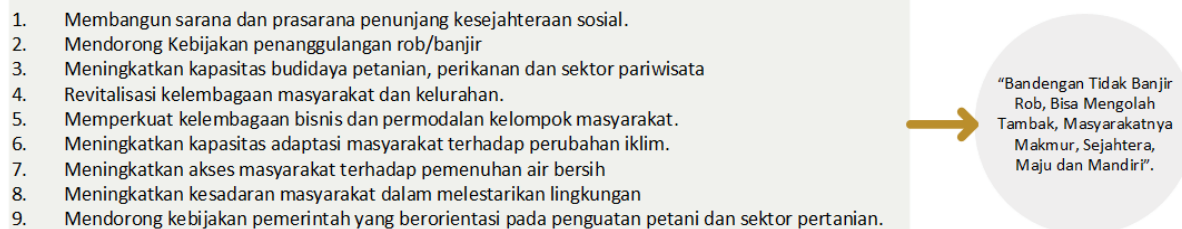
2. ARAHAN STRATEGIS PENGEMBANGAN WILAYAH KELURAHAN BANDENGAN

Merujuk pada peta visi masyarakat Bandengan, dan 9 isu strategis (akar masalah) yang disimpulkan dalam analisis masalah, maka dalam merumuskan arahan penyelesaian isu strategis pengembangan wilayah Kelurahan Bandengan merujuk (i) pencapaian visi PLUP; dan (ii) Arahan penyelesaian akar masalah, yang dirumuskan menjadi 9 arahan strategis pengembangan wilayah. Berikut adalah 9 arahan strategis pengembangan Kelurahan Bandengan, adalah:

1. Membangun sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial.
2. Mendorong Kebijakan penanggulangan rob/banjir
3. Meningkatkan kapasitas budidaya pertanian, perikanan dan sektor pariwisata
4. Revitalisasi kelembagaan masyarakat dan kelurahan.
5. Memperkuat kelembagaan bisnis dan permodalan kelompok masyarakat.
6. Meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim.
7. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan air bersih
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan
9. Mendorong kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penguatan petani dan sektor pertanian.

Ke-9 arahan strategis di atas, dinilai masyarakat dapat mewujudkan “Bandengan Tidak Banjir Rob, Bisa Mengolah Tambak, Masyarakatnya Makmur, Sejahtera, Maju dan Mandiri”.

Gambar 8: Diagram Arahan Strategis Pengembangan Wilayah Bandengan



BAB V. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

1. PRORAM PENGEMBANGAN WILAYAH

1. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Berikut ini adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan sosial.

Tabel 13: Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kesejahteraan Sosial

No	Program	Indikator	Sasaran
1	Perbaikan jalan kelurahan dan menuju tanggul raksasa		DPUPR
2	Perbaikan Saluran Air (Drainase & Sanitasi)		DPUPR / Pemerintah Kelurahan
3	Dibangun TPST, pengadaan gerobak sampah dan tempat sampah di setiap RT		Seluruh wilayah Kelurahan
4	Pembuatan Jamban Keluarga		Dinperkim
5	Perbaikan Sarana Air Bersih PAMSIMAS		DPUPR
6	Dibangun Sentra jual beli ikan		DKP

2. PROGRAM PENDORONG KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN ROB/BANJIR

Berikut ini adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk mendukung agar kebijakan pemerintah maksimal dalam menanggulangi rob/banjir.

Tabel 14: Program Penanggulangan Rob/Banjir

No	Program	Indikator	Sasaran
1	Pemacah gelombang dan sitepale		DPUPR, BBWS
2	Penanaman mangrove/wilayah konservasi		DLH, BBWS Provinsi
3	Normalisasi aliran sungai		(DPUPR, DINPERKIM, BBWS SWADAYA)
4	Pembuatan rumah pompa dan tanggul		DPUPR
5	Sering berkomunikasi dengan pemda yang berhubungan dengan rob/banjir		Komunikasi dengan penentu kebijakan agar mendapat dukungan program
6	Pembuatan pintu (kelep) di Tanggul raksasa untuk sirkulasi air		DPU PR dan BBWS
7	Merancang system Minapadi pada sawah tergenang		DKP dan Dinas Pertanian

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS BUDIDAYA PERIKANAN, LINGKUNGAN DAN PARIWISATA

Berikut ini adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas budidaya perikanan.

Tabel 15: Program Peningkatan Kapasitas Budidaya Perikanan

No	Program	Indikator	Sasaran
1	Pelatihan Budidaya Perikanan Air Payau		Petambak (DKP)
2	Pelatihan Pengelolaan Wisata Pesisir		Dinas Pariwisata
	Pembentukan Pokdarwis		Dinas Pariwisata
3	Pelatihan Enterpreunership untuk Pemuda dan Ibu-ibu Rumah tangga		Diperindagkop UMKM dan BLK
4	Pelatihan Ketrampilan membuat olahan hasil perikanan		Diperindagkop, DKP
5	Penguatan kelompok petani tambak / nelayan		DKP

4. PROGRAM REVITALISASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT & KELURAHAN

Berikut ini adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk merevitalisasi kelembagaan masyarakat dan Kelurahan.

Tabel 16: Program Revitalisasi Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan

No	Program	Indikator	Sasaran
1	Sosialisasi dan Rembug Kampung		Kelurahan & FasKel
2	Penyuluhan dan Edukasi Penanggulangan Bencana Rob dan Banjir		BPBD Dinsos
3	Pelatihan Kelembagaan Kelompok Nelayan dan Petambak		DKP
4	Penguatan Kelompok Nelayan dan Petambak		Faskel/Pendamping, DKP

5. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BISNIS & PERMODALAN KELOMPOK MASYARAKAT

Berikut ini adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk menguatkan bisnis dan permodalan kelompok masyarakat

Tabel 17: Program Penguatan Kelembagaan Bisnis dan Permodalan Kelompok Masyarakat

No	Program	Indikator	Sasaran
1	Membangun kemitraan dengan Swasta dan Perbankan		Swasta dan Perbankan
2	Pelatihan Perencanaan Bisnis dan Pemasaran Kelompok Nelaya dan Tambak		DKP, Diperindagkop UMKM

6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS ADAPTASI MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

Berikut ini adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim.

Tabel 18: Program Peningkatan Kapasitas Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Iklim

No	Program	Indikator	Sasaran
1	Konservasi Laut dan Pesisir (penanaman terumbu karang dan mangrove)		Nelayan, Petani tambak dan DKP
	Sosialisasi dan penyuluhan menghadapi perubahan iklim (banjir dan rob) kepada individu maupun kelompok		DKP dan BPBD
2	Simulasi Bencana		BPBD dan Dinas Sosial
3	Pelatihan Nelayan dan Petambak dalam menghadapi cuaca (perubahan iklim)		DKP dan Dinas Pertanian

7. PROGRAM PERBAIKAN PENGELOLAAN AIR BERSIH UNTUK PENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PEMENUHAN AIR

Berikut ini adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan air bersih.

Tabel 19: Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pemenuhan Air Bersih

No	Program	Indikator	Sasaran
1	Perbaikan saluran air (Drainase & Saniitasi)		DPUPR, Dinsos,
2	Pembuatan MCK komunal		DPUPR, Dinsos
3	Penyuluhan RT/RW PHBS		Dinas Kesehatan, Puskesmas

8. PROGRAM MENDORONG KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERORIENTASI PADA PENGUATAN PETANI, SEKTOR PERIKANAN DAN USAHA DOMESTIK

Berikut ini adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penguatan petani dan sector perikanan

Tabel 20: Peningkatan Kebijakan Pemerintah terhadap Penguatan Petani dan Sektor Perikanan

No	Program	Indikator	Sasaran
1	Stabilisasi harga pakan		Disperindagkop dan UMKM
2	Filterisasi (Pergantian air) kawasan tambak dan Penelitian (Teknis/Akademisi)		Dinas Pengairan dan Dinas Perikanan
3	Fasilitasi pengembangan usaha pemasaran dan sarana pemasaran produk perikanan		Disperindagkop dan UMKM
4	Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Masyarakat		Disperindagkop dan UMKM

9. PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN

Berikut ini adalah tabel program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan

Tabel 21: Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Lingkungan

No	Program	Indikator	Sasaran
1	Penanaman mangrove		Pantai, Sungai
2	Bakti sosial/Kerja bakti/Aksi Bersih Lingkungan		Semua Masyarakat
3	Membuat Paguyuban Darling (Sadar Lingkungan) di tiap RT/RW		RT / RW
4	Sosialisasi Kesadaran Lingkungan 5 K		Semua Warga

2. PROGRAM PRIORITAS

Program prioritas (peluang) yang diharapkan dapat dilakukan untuk mempercepat penanganan permasalahan di Kelurahan Bandengan dalam kurun waktu terdekat adalah sebagai berikut:

Tabel 22: Program prioritas (peluang) usaha Masyarakat Kelurahan Bandengan

No	Program	Indikator	Sasaran	Mitra Strategis
1.	Pengolahan berbagai produk perikanan misalnya menjadi bandeng presto, olahan beku (frozen food), trasi, krupuk, dan melakukan diversifikasi usaha pengolahan ikan yang dapat menjangkau pasar regional maupun nasional dengan mengundang tenaga ahli/ekspert	Terwujudnya usaha pengolahan hasil perikanan yang melibatkan para petani tambak dan bermanfaat kepada masyarakat petambak/ pencari ikan di kelurahan Bandengan	Masyarakat petambak dan nelayan terlibat 100% dalam usaha pengolahan produk perikanan Minimal 50% produk perikanan bisa diserap sebagai bahan baku pengolahan ikan	DKP, Diperindag naker, Perbankan dan Swasta
	Perlakuan pengemasan (packing) yang sesuai dengan standar kemasan produk nasional terhadap hasil olahan perikanan yang telah dibuat	Packing kemasan yang memenuhi standar kemasan nasional (SNI) yang bisa meningkatkan nilai jual maupun keawetan produk	100% produk hasil olahan perikanan dapat terkemas dengan baik sesuai dengan standar	
	Inisiasi pemasaran produk hasil olahan perikanan yang mampu menembus pasar dalam skala luas	Terbentuknya jaringan pemasaran yang mampu menembus wilayah yang luas	100% produk hasil olahan perikanan bisa terjual ke konsumen di berbagai tempat	
2.	Pengadaan pakan murah yang mampu dijangkau oleh petani tambak dengan kualitas bagus	Adanya pakan murah yang bisa dijangkau oleh para petambak di Kelurahan Bandengan	100% petambak di Bandengan bisa menikmati pakan yang terjangkau harganya dan dengan kualitas bagus 50% hasil produksi bisa dijual ke petambak di luar Kelurahan Bandengan	DKP, Perguruan Tinggi, Swasta
	Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan pakan yang murah dan terjangkau (perusahaan pakan, grosir besar)			
	Memutus jaringan rantai pasok pakan ikan sehingga bisa			

	dijual dengan harga yang lebih murah			
3	Rehabilitasi pesisir dan rawa menjadi tempat yang lebih produktif seperti untuk pengembangan usaha mina padi, pemancingan & wisata	Terwujudnya lingkungan pesisir menjadi kawasan konservasi, usaha perikanan (mina padi) dan wisata pesisir	100 % petani tambak dan nelayan dapat melakukan budidaya minapadi dan pengembangan wisata pesisir di utara dan selatan tanggul juga membangun kemitraan dengan OPD terkait dan sektor swasta	BBWS Pusdataru, DKP, DLH, Dinas Pariwisata, Perbankan dan Swasta

3. TIM PENGGERAK HASIL PLUP

Untuk mewujudkan visi PLUP, arahan strategis pengembangan wilayah Bandengan, mengawal usulan dan pelaksanaan program hasil PLUP, dibentuk Tim Penggerak PLUP Bandengan.

1. KRITERIA TIM PENGGERAK KELURAHAN

Berdasarkan hasil diskusi dan pleno yang dilakukan, bahwa anggota Tim Penggerak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Usia diatas 25 tahun dibawah 50 tahun
- Kober, bener, pinter (perhatian, sungguh-sungguh, pandai)
- Jujur, Tanggung jawab dan Mau kerja keras
- Berani (tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan)

2. TUGAS TIM PENGGERAK KELURAHAN

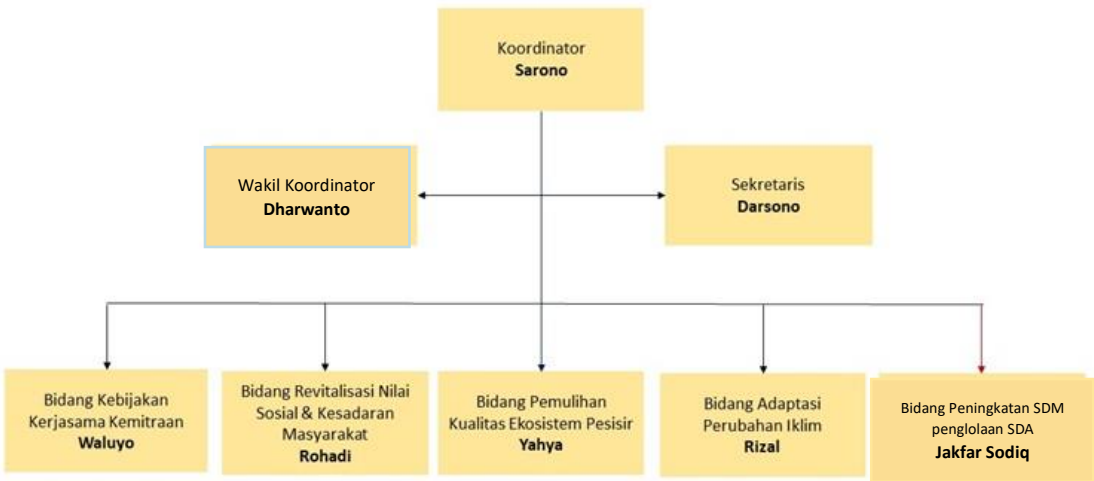
Adapun tugas-tugas Tim Penggerak Kelurahan ini adalah:

- Membangun kemitraan dan meloby
- Mendorong kesadaran masyarakat
- Mendorong program mengenai kelestarian ekosistem
- Meningkatkan ketrampilan SDM dalam menghadapi perubahan iklim

3. STRUKTUR TIM PENGGERAK KELURAHAN

Berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang diwakili oleh masyarakat berbagai unsur, dipilih dan dan sepakati Struktur Tim Penggerak Kelurahan Bandengan sebagaimana organogram berikut:

Gambar 9: Struktur Tim Penggerak Kelurahan Bandengan



LAMPIRAN: DAFTAR HADIR DAN FOTO

1. DAFTAR HADIR PLUP

DAFTAR HADIR FIELD FACILITATOR				
HARI / TANGGAL : Sabtu, 6-11-2021				
TEMPAT : Bp. Casono Rt 02/6 Bandengan				
No	Nama	Alamat	Hp	Ttd
1	NUR RIZQIYATI	BANDENGAN	085747068121	1
2	ABDUS SHOMAR	Krapyak	082135267082	2
3	Achmad Sachawi	Krapyak	085876216759	3
4	Catur Wijayanto	Jenikmaru	085726586995	4
5	Cecono	Jeraksono		5
6	Kuwaci	Bandengan		6
7	Heriwartha	Tegayu		7
8	Gunawan	Dlegayn		8
9	Iman N Kiki	Pekalongan		9
10				10

FGD Bandengan 3

DAFTAR HADIR FIELD FACILITATOR				
HARI / TANGGAL : Jumat, 19-11-2021				
TEMPAT : RT:03 RW:06 Kel. Bandengan				
No	Nama	Alamat	Hp	Ttd
1	Iman N Kiki	Pekalongan		1
2	Achmad Sachawi	Krapyak		2
3	ABDUS SHOMAR	Krapyak		3
4	Catur Wijayanto	Jenikmaru		4
5	NUR RIZQIYATI	BANDENGAN		5
6	Kuwaci	Bandengan		6
7				7
8				8
9				9
10				10

FGD PLUP BANDENGAN

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Sabtu, 6-11-2021

TEMPAT : Rp. Cassano Rt 03/6 Bandengan

No	Nama	Alamat	Keterangan	Hp	Ttd
1	ABDUS SHOMAD	09/10	RT		1
2	SARONO	bandengan RT 05		0813 2069 4876	2
3	CASSANO				3
4	Rasjani				4
5	Dukei		Rt 4/6		5
6	tarziki		Rt 05/6		6
7	Krambali		Rt 05/6		7
8	Wovok		Rt 04/6		8
9	Salatun		Rt 04/6		9
10	Idris		Rt 3/6		10
11	Jatir S.		Rt 2/6		11
12	WALUYO		Rt 3/6		12
13	DAMIRI		Rt 4/6		13
14	DARYANTO		Rt 3/6		14
15	DARSONO		Rt 1/6		15
16	TRISNO		Rt 04/6		16
17	HERNIANTO		Rt 3/6		17
18	Dharwanto			0895 337383017	18
19	SLAMET WAERI		Rt 03		19
20	Djaru Prayogo		Rt 01/06	0056 4261 6664	20
21	M. Abadi				21
22	YAHYA		Rt 4/06		22
23	Damiri		Rt 4/06		23
24	Daryani		Rt 4/6		24
25	RAGULIN		Rt 4/6		25
26	Zaenal Arifin	Bandengan	Lurah		26
27					27
28					28
29					29
30					30

Mlm Senin / Jumat

Scanned by TapScanner

760.2

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Rabu, 10 - November - 2021

TEMPAT : RT.01 RW.06 Kel. Bandungan

No	Nama	Alamat	Keterangan	Hp	Ttd
1	Ganjuti	BANDONGAN			1
2	Djano Prayogo	Bandongan			2
3	Ani Luman	-			3
4	Jafar S.	-			4
5	Saron	-			5
6	SARONO	-			6
7	Khambahi	-			7
8	M. Abadi	-	Wajah Bandungan		8
9	Rachadi	-			9
10	Casim	-			10
11					11

Earthworm

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Jumat, 19 - 11 - 2021

TEMPAT : Kelompok Nelayan RT.03 RW.06 Kel. Bandungan

No	Nama	Alamat	Keterangan	Hp	Ttd
1	RASULIN	Bandongan			1
2	CASSANO	RW 6			2
3	DARSONO				3
4	Dar Yani				4
5	Salatan				5
6	WALUYO				6
7	ARMANTO				7
8	wowok				8
9	HERMANTO	BANDONGAN			9
10	widianto				10
11	Rasmadi				11
12	DARYANTO	RW 6			12
13	DAMIRI				13
14	YAHYA				14
15	SARONO				15
16	Ganjuti				16
17	Khambahi				17
18	JAFAR S.	RW.06			18
19	IDRIS				19
20	Darwani	Bandongan			20
21					21

2. FOTO PLUP

Foto FGD PLUP ke 1 Kelurahan Bandengan



Foto FGD PLUP ke 2 Kelurahan Bandengan



Foto FGD PLUP ke 3 Kelurahan Bandengan

